



UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MENGHENTIKAN EMBARGO MILITER AMERIKA SERIKAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata I (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Aspek	Uraian	Mass
Prima/gi:	103 FEB 2006	32719873
No. induk:		WAR
Pengantar:		U e

Irma Whismu Wardhani
HI/98-1236

INDONESIA - HUBUNGAN INTERNASIONAL - AMERIKA SERIKAT

Pembimbing :
Drs. Supriyadi, Msi
NIP. 131 474 383

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

2003

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan didepan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah Satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 29 Desember 2003
Waktu : 09.00 WIB

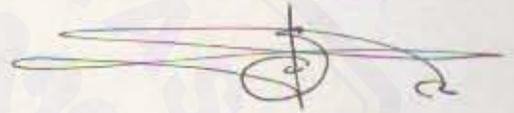
Panitia Penguji :

Ketua



Drs. Umaid Radi, MA
NIP. 130239058

Sekretaris

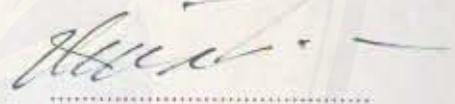


Drs. Supriyadi, Msi
NIP. 131474383

Susunan Panitia Penguji

1. Drs. Umaid Radi, MA
NIP. 130239058

(Ketua)



2. Drs. Supriyadi, Msi
NIP. 131474383

(Sekretaris)



3. Drs. Djoko Susilo, Msi
NIP. 131832318

(Anggota)



Mengetahui :
Dekan FISIP
Universitas Jember



Drs. Moch. Toerki
NIP. 130524832

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Whisnu Wardhani
NIM : 980910101236
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Institusi : Universitas Jember

Sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Demikian pernyataan saya yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, Desember 2003

Penulis,

Irma Whisnu Wardhani

Nim : 980910101236

PERSEMBAHAN

Teriring panjatan doa,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku,

Ayah Mochammad Sa'ad dan Mama Yusfarida Uminarsih
yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan kepercayaan
hingga penulis mampu menjalani segala cobaan yang mengajarkan
arti kehidupan

Kedua adikku, Firna dan Oki

Yang selalu menjadi semangat dan dorongan hidupku

Untuk Kakek Heri Prasajo dan Nenek Wandaningsih

Yang selalu memberikan dukungan dan kesabaran yang cukup besar
Terhadap segala tindakan yang kulakukan

For someone yang telah mewarnai kehidupanku

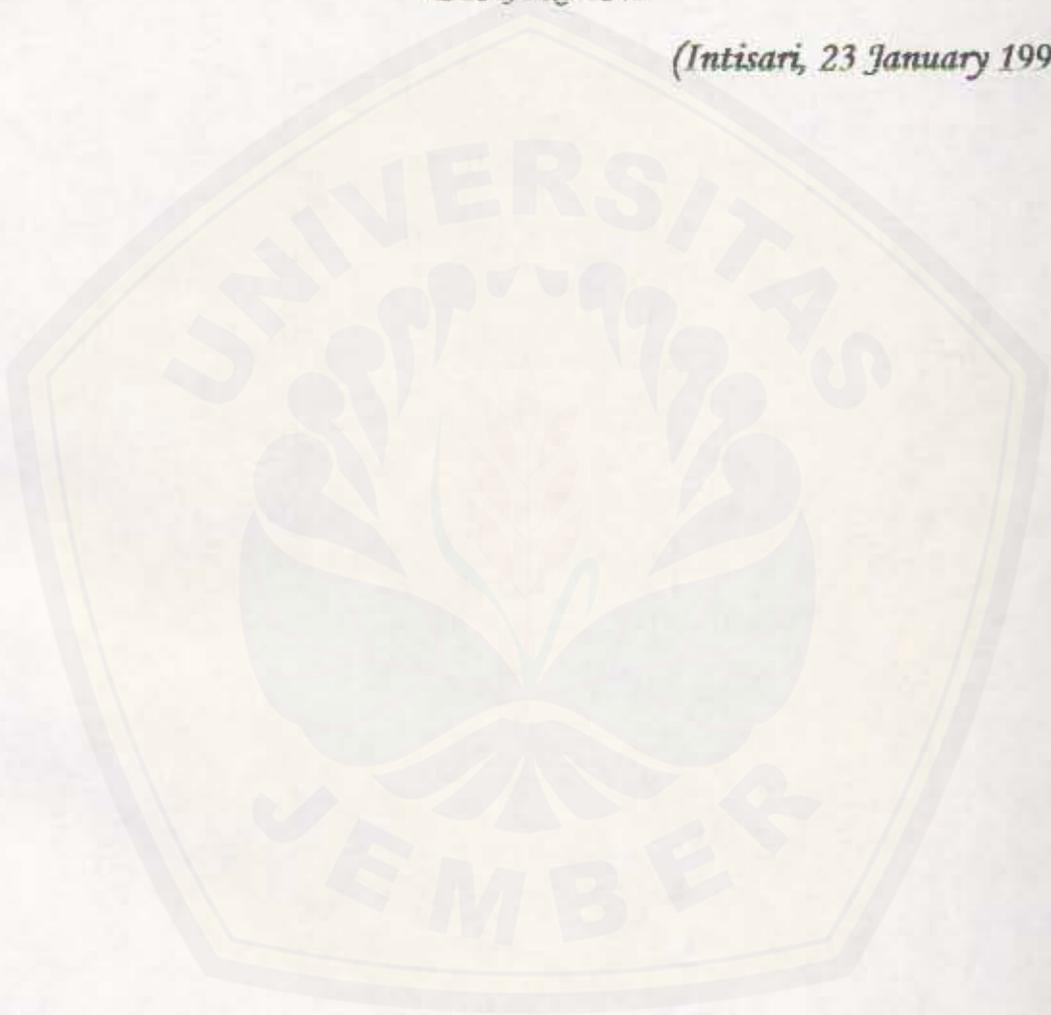
Kamu membuatku semakin tegar dalam
menghadapi segala cobaan

Dan untuk Almamaterku

MOTTO

*"DIANTARA MIMPI-MIMPI ESOK DAN PENYESALAN
TENTANG HARI-HARI KEMARIN, ADA KESEMPATAN
DIHARI INI"*

(Intisari, 23 January 1995)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb

Bismillahirrahmaanirohiim

Tiada kata yang paling indah yang sanggup terucapkan selain pujian dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pemerintah Indonesia Menghentikan Embargo Militer Amerika Serikat”** dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus telah memberikan dukungan dan bantuan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Supriyadi, MSi, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, bimbingan, bantuan, dan saran yang cukup besar dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS, selaku Dosen Wali.
3. Bapak Drs. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H.M. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi, serta seluruh Civitas Akademika FISIP Universitas Jember.
6. Staff perpustakaan CSIS dan UGM.
7. Sahabatku **Andi Rizki/Bebek**, yang banyak membantu dan menjadi penggerutu yang sering mengkritik dan memarahiku. Thanks atas kesabarannya ya Wek!
8. Sahabat-sahabatku **Erika Cimot** yang kadang bisa sangat menyebalkan, **Juni Lembut** yang Cerewet dan **Titah Tipluk**

yang menjengkelkan, **You're the best thing in my life.**

9. Buat **Jefri** yang sudah menjadi pendengar atas semua masalahku, thanks buat advisenya. **Your support means a lot for me.**
10. **Arif** (thanks atas terjemahannya), **Rizal Emon** (matur nuwun printer dan omelannya), **Yunan** (terima kasih atas perlindungannya), **Krisna** (thanks buat jadi teknisi komputerku), terima kasih atas kesabaran kalian menghadapiku.
11. Sahabat-sahabatku dirumah yang sering aku repotin, **Mitha, Ana, Yuyun, Wiwid, Didik, Slamet, Novi, Ferdi**, terima kasih atas dukungan dan persahabatan yang kalian berikan.
12. Buat **Ipung (drg. Purwanisiwi)**, thanks buat semuanya Pung, sorry aku sering ngrepotin kamu!
13. Seluruh Penghuni Belitung 1/35, **Nunik, Fifi, Lila, Yolanda** dan **Delbinya, Mbak Atik** dan **Tyo, Mbak Santi, Ari, Lina**, thanks atas kehangatan persaudaraan dan keceriaannya.
14. Teman-teman HI'98 : **Ipin, Yony, Andi S, Yayang Tika Agung, Fery, Iwan** yang selalu memenuhi hariku dikampus dengan tawa dan canda, serta semuanya yang belum tercantum.
15. Untuk teman-teman yang sering menemani hari-hariku, **mbak Ory, Testi, Etil, Widi,, Kukuh Kepir, Arif Surip, Bekti** dan **Farid. I'll never forget you!**
16. Buat **Someone** yang sempat menemani hari-hariku, thanks buat semuanya
17. Semua pihak yang belum tercantum yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak.

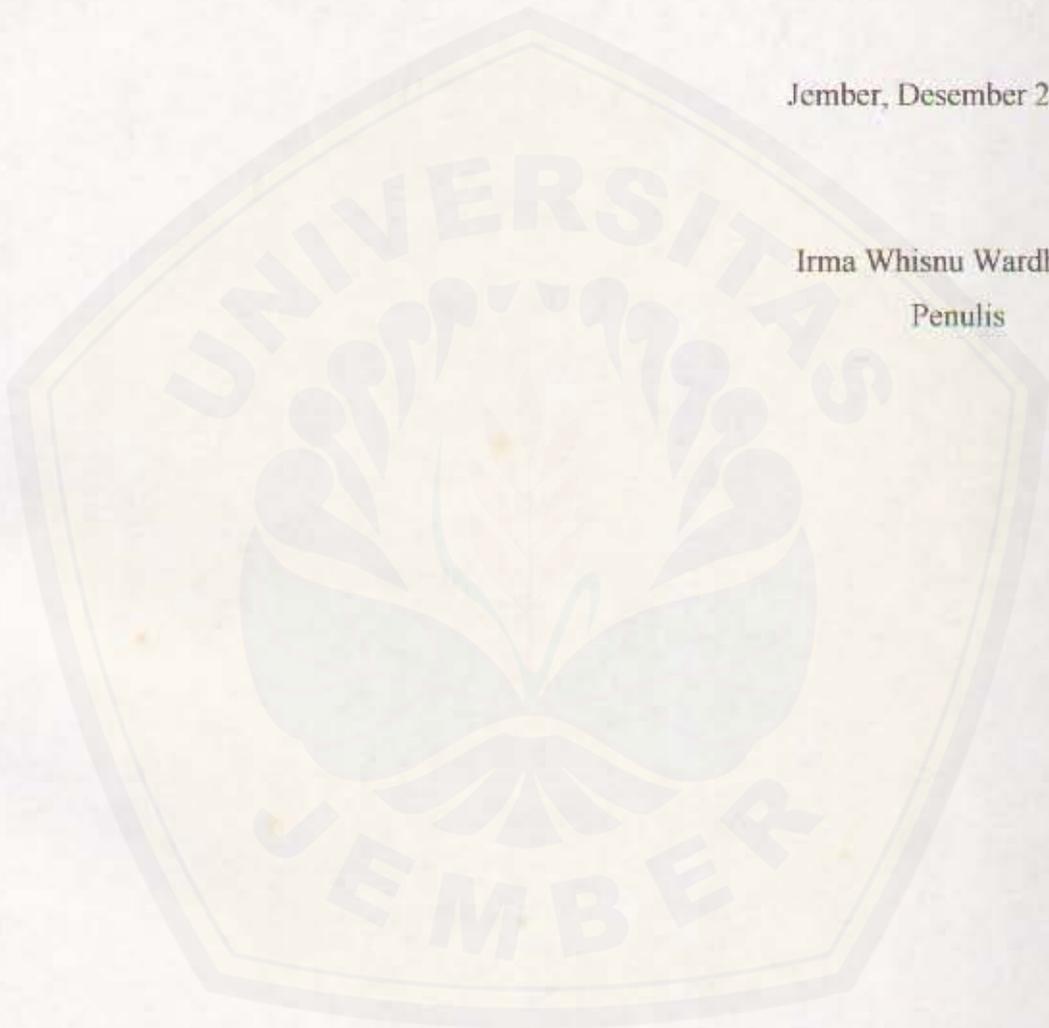
Akhir kata, semoga pemikiran yang diangkat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dan semoga dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Amin...

Wassalamualaikum wr.wb.

Jember, Desember 2003

Irma Whisnu Wardhani

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	i
Halaman Orientasi Penulis	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
1.2.1 Pembatasan Materi.....	7
1.2.2 Pembatasan Waktu.....	7
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Kerangka Dasar Pemikiran.....	10
1.5 Hipotesa.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.2 Teknik Analisa Data.....	17
1.7 Metode Pendekatan.....	18
BAB II LATAR BELAKANG PEMBERLAKUAN EMBARGO MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA	
2.1 Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat	21
2.1.1 Gambaran Umum Hak Asasi Manusia.....	21
2.1.2 Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat	24

2.1.3 Kongres dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat	27
2.2 Krisis Timor-Timur	29
2.2.1 Sejarah Konflik Timor-Timur	30
2.2.2 Pilihan Referendum dan Kondisi Keamanan Timor-Timur	33
2.2.3 Kondisi Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat	37
2.3 Kebijakan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat terhadap Indonesia Pasca Jajak Pendapat	40

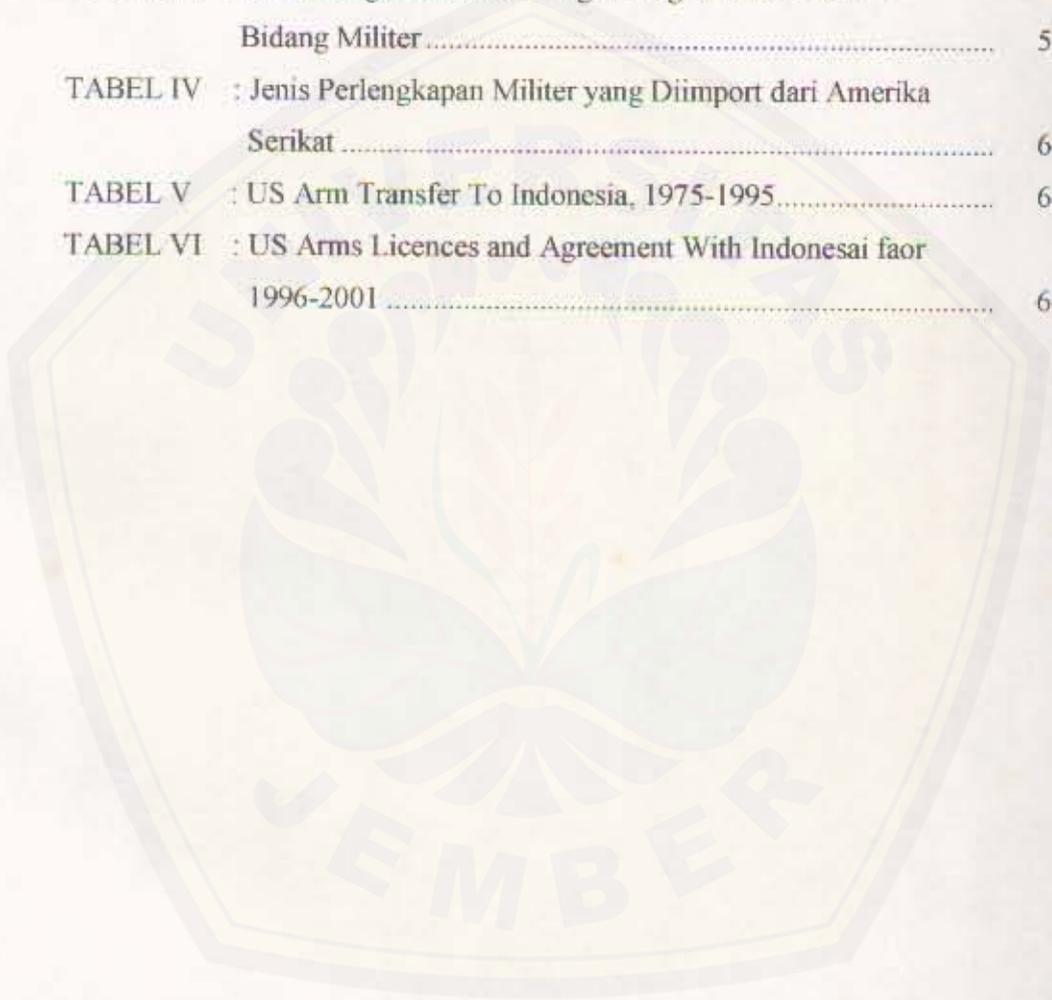
BAB III PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP

SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA	43
3.1 Sistem Pertahanan Keamanan Indonesia	43
3.1.1 TNI dan Bela Negara	45
3.1.2 Teknologi yang dibutuhkan dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertahanan Keamanan Negara	49
3.1.3 Dukungan Anggaran Bagi Pertahanan Keamanan Indonesia	53
3.2 Peran Amerika Serikat Terhadap Sistem Pertahanan Keamanan Indonesia	54
3.2.1 Keunggulan Ekonomi-Militer Amerika Serikat	55
3.2.2 Peran Amerika Serikat Bagi Militer Indonesia	58
3.3 Penerapan Embargo Senjata Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Dampak yang Ditimbulkan	65
3.3.1 Dampak Embargo Militer Amerika Serikat bagi TNI Angkatan Darat dan Polri	67
3.3.2 Dampak Embargo Militer Amerika Serikat bagi TNI Angkatan Laut	67
3.3.3 Dampak Embargo Militer Amerika Serikat bagi TNI Angkatan Udara	70

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO MILITER AMERIKA SERIKAT	72
4.1 Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur	72
4.1.1 Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur	72
4.1.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak asasi Manusia di Timor- Timur.....	74
4.1.3 Pengajuan Tersangka Pelanggar Hak Asasi Manusia di Timor-Timur	76
4.2 Reformasi TNI	78
4.2.1 Reformasi Internal TNI	79
4.2.2 Paradigma Baru TNI	82
4.2.3 Penghapusan Peran Sosial Politik TNI	85
4.3 Perubahan yang Terjadi Dalam Embargo Militer Amerika Serikat Terhadap Indonesia	86
4.3.1 Reaksi dari Pemerintah Amerika Serikat.....	86
4.3.2 Perubahan Yang Terjadi Dalam Embargo Militer Amerika Serikat	88
4.3.3 Upaya Permerintah Indonesia untuk Mengurangi Dampak Embargo Militer Amerika Serikat.....	92
BAB V KESIMPULAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Perbandingan Kondisi Tentara Indonesia dan Negara Lain	54
TABEL II	: Perbandingan Kekuatan Negara-negara Besar Dalam Bidang Ekonomi.....	56
TABEL III	: Perbandingan Kekuatan Negara-negara Besar Dalam Bidang Militer	57
TABEL IV	: Jenis Perlengkapan Militer yang Diimport dari Amerika Serikat	62
TABEL V	: US Arm Transfer To Indonesia, 1975-1995.....	64
TABEL VI	: US Arms Licences and Agreement With Indonesai faor 1996-2001	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hubungan antara dua negara dalam pergaulan internasional selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hubungan tersebut dapat terbentuk karena adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Pada suatu saat, hubungan antara dua negara membentuk suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, tapi pada saat yang lain, hubungan tersebut dapat mengalami perubahan menjadi sebuah konflik. Dinamika hubungan antara dua negara sangat ditentukan oleh adanya suatu kepentingan nasional yang mendasari tindakan suatu negara dalam menghadapi negara lain.

Hal-hal yang mempengaruhi hubungan internasional dewasa ini adalah perkembangan arus demokrasi, pemerintahan yang baik, pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan yang paling mendapatkan perhatian dunia adalah masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia seringkali menjadi pembicaraan dalam organisasi internasional seperti PBB untuk menekankan kepentingannya atau untuk mengecam pemerintah-pemerintah yang tidak memperhatikan masalah hak asasi manusia. Bahkan negara-negara Barat menjadikan masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik

sebagai bagian utama kebijakan luar negeri mereka. Masalah hak asasi manusia dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan luar negeri.

Pasca perang dingin, dunia tidak lagi dihadapkan pada persoalan ideologi Barat dan Timur, dimana Amerika Serikat gencar melaksanakan kampanye anti komunisnya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, politik luar negeri Amerika Serikat lebih terfokus pada persoalan hak asasi manusia, Amerika Serikat menjadikan isu-isu hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan kebijakan luar negeri mereka terhadap negara lain. Dalam undang-undang bantuan luar negeri Amerika Serikat diantaranya menetapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak diijinkan memberikan bantuan kepada pemerintah suatu negara yang terlibat dalam pola pelanggaran yang mencolok dan terus menerus atas hak asasi manusia yang juga diakui oleh dunia internasional¹.

Berakhirnya perang dingin juga telah memposisikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa di dunia. Ini disebabkan Amerika Serikat mempunyai kekuatan yang cukup besar secara ekonomi maupun secara militer, terbukti dengan adanya kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan hampir disemua kawasan di dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara. Amerika Serikat juga merupakan salah satu pemasok persenjataan terbesar ke negara-negara dunia ketiga, disamping Uni Soviet, Inggris, Perancis. Jenis senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat kebanyakan merupakan jenis senjata utama².

¹ Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal 88

² William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, suatu telaah teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 127.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia mempunyai ketergantungan kepada negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Begitu juga dengan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Disamping menjalin hubungan diplomatik, Indonesia juga menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Dalam kerjasama dibidang militer ini, Amerika Serikat mempunyai andil yang cukup besar. Disamping memberikan bantuan dalam bentuk dana, Amerika Serikat merupakan pemasok persenjataan terbesar bagi militer Indonesia³. Dengan menjalin hubungan militer dengan Amerika Serikat diharapkan militer Indonesia dapat belajar dari Amerika Serikat yang mempunyai kekuatan militer yang lebih besar, sehingga kekuatan militer Indonesia menjadi lebih efektif.

Kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini mendapat perhatian dari dunia internasional. Banyaknya kerusuhan yang disebabkan situasi politik dalam negeri mempengaruhi penilaian negara-negara lain terhadap Indonesia. Masalah hak asasi manusia juga sangat mempengaruhi citra Indonesia di mata Internasional. Begitu pula dengan peristiwa lepasnya propinsi termuda Indonesia, Timor Timur yang telah mencoreng nama Indonesia didunia Internasional. Kekacauan yang terjadi setelah pengumuman hasil jajak pendapat menimbulkan reaksi yang sangat keras dari berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. Peristiwa itu sekaligus menjadi ganjalan bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menganggap telah banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan adanya tuduhan

³ Kompas, *Washington Tangguhkan Kerjasama Militer*, Dokumen CSIS, 11 September 1999

keterlibatan militer Indonesia dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.

Dengan adanya krisis Timor Timur tersebut, hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami gangguan. Bahkan pada bulan September 1999, Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer (senjata) terhadap Indonesia, yang meliputi pelarangan penjualan suku cadang pesawat F-16 model A dan B, serta pesawat angkut Hercules C-130, karena Amerika Serikat menilai militer Indonesia bertanggung jawab mengobarkan kekerasan yang terjadi pasca pengumuman hasil jajak pendapat di Timor Timur⁴.

Embargo militer Amerika Serikat tersebut mempunyai dampak yang cukup besar bagi Indonesia, terutama militernya. Meskipun hal itu tidak terlalu mempengaruhi persenjataan strategis TNI Angkatan Darat, namun embargo itu sangat mempengaruhi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Bagi Angkatan Darat, embargo itu tidak terlalu mempengaruhi karena Angkatan Darat menggunakan persenjataan strategis beserta suku cadang buatan dalam negeri. Akibat embargo militer Amerika Serikat menyebabkan perawatan dan perbaikan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut terhambat, karena suku cadangnya berasal dari Amerika Serikat. Dari 114 kapal perang TNI AL yang ada, hanya 30 kapal perang yang bisa beroperasi dengan baik diseluruh perairan Indonesia. Begitu juga dengan pesawat tempur TNI AL yang kebanyakan berasal dari Amerika Serikat, seperti F-16, F-5, dan A-4. Sementara itu, pesawat TNI AU yang dapat

⁴ Media Indonesia, *Rumsfeld Desak Konggres AS Cabut Embargo atas RI*, Dokumen CSIS, 15 Mei 2002.

dioperasikan menurun sampai 50%. Hanya sekitar 113 dari 226 pesawat tempur TNI AU yang mampu beroperasi maksimal⁵.

Salah satu kriteria terpenting dari kekuatan militer suatu negara adalah sifat perlengkapan militernya. Makin tergantung suatu negara pada sumber luar negeri dalam menunjang kekuatan angkatan bersenjata, makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar negeri. Produk-produk dukungan logistik seperti suku cadang pesawat bagi militer Indonesia sebagian masih tergantung pada Amerika Serikat. Dengan ditetapkannya embargo senjata oleh Amerika Serikat, sejumlah peralatan dan suku cadang pesawat mengalami pengurangan sehingga hal ini mempengaruhi upaya-upaya penyelesaian krisis keamanan dalam negeri Indonesia. Sedangkan sistem persenjataan merupakan instrumen yang sangat vital bagi militer, karena merupakan alat pertahanan dan keamanan wilayahnya sendiri. Setiap negara tidak dapat mengingkari bahwa kualitas persenjataan merupakan faktor penting dan instrumen paling efektif dalam politik luar negeri, disamping diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda dan intervensi⁶.

Kondisi perlengkapan militer yang dimiliki Indonesia setelah pemberlakuan embargo senjata oleh Amerika Serikat mengalami penurunan sehingga membuat pemerintah Indonesia mencari cara agar Amerika Serikat menghentikan embargo militernya, dan yang dilakukan Pemerintah Indonesia

⁵ Kepala Dinas Penerangan Umum TNI, Kolonel Inf.Poltak Sidjabat, *Embargo Tak Pengaruhi Angkatan Darat*, Tempo/Dokumentasi CSIS, 6 Maret 2002.

⁶ Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar negeri, sebuah analisis teoritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989.

adalah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Tuntutan tersebut antara lain menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan masalah Timor Timur dan melakukan reformasi dalam tubuh militernya.

Sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memenuhi tuntutan yang diajukan, Amerika Serikat mencairkan hubungan militer dengan Indonesia meskipun berskala kecil, dalam bentuk latihan bersama penanggulangan bencana alam, membuka kembali program IMET (International Military Education Training) dan juga membolehkan penjualan suku cadang pesawat angkut Hercules C-130/pesawat non tempur, akan tetapi kongres Amerika Serikat tetap bersikeras untuk membekukan kerjasama militernya dengan Indonesia. Karena Kongres Amerika Serikat menilai penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan reformasi yang dilakukan TNI masih belum memenuhi standard⁷.

Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya mencari alternatif lain dalam pengadaan perlengkapan militer, akan tetapi upaya untuk menghentikan embargo militer Amerika Serikat masih terus dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan embargo senjata yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia sejak kerusuhan yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur kedalam sebuah skripsi dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MENGHENTIKAN EMBARGO MILITER AMERIKA SERIKAT”**

⁷ <http://www.kompas.com>

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan sangat perlu dilakukan untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak terfokus. Tujuan diadakannya pembatasan tersebut dengan menentukan ruang lingkungnya adalah untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan (*problem analysis*) secara sistematis dan terarah, untuk mencapai suatu pembahasan yang menyeluruh (*comprehensive*).

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan meliputi dua aspek:

1.2.1 Pembatasan Materi.

Batasan materi mengacu pada cakupan kawasan gejala atau daerah studi. Yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan pemberlakuan embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Waktu

Batasan waktu adalah rentangan waktu terjadinya peristiwa objek analisis. Dalam penulisan ini penulis memberikan batasan waktu tersebut antara tahun 1999 sampai tahun 2002, dengan alasan bahwa pada tahun 1999 merupakan tahun dimana mulai terjadi kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat memberlakukan embargo militer terhadap Indonesia. Sedangkan akhir pembatasan waktu sampai tahun 2002, merupakan awal penulisan skripsi.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan titik awal dari sebuah peristiwa yang mengantar seorang peneliti menuju pada upaya pemecahan dalam sebuah pembahasan ilmiah. Sebelum merumuskan masalah perlu adanya pembatasan pengertian masalah tersebut, menurut Winarno Surachmad, permasalahan ialah:

“Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu rintangan yang mestinya dilalui atau dengan jalan mengatasi apabila ingin terus berjalan”.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, penulis mencoba untuk mendasari jalan kajian ini dan berupaya merumuskan permasalahan penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu maka penulis akan memberikan uraian tentang latar belakang masalah yang kemudian merumuskannya kedalam permasalahan.

Seperti yang diuraikan diatas, beberapa kriteria terpenting dalam mengukur kekuatan militer suatu negara adalah, *pertama*, jumlah pasukan, *kedua*, tingkat pelatihan, dan yang, *ketiga*, adalah perlengkapan militernya. Dari ketiga kriteria tersebut, Indonesia mempunyai tingkat ketergantungan terhadap Amerika Serikat dalam hal pelatihan dan perlengkapan militer. Dengan diberlakukannya embargo militer oleh Amerika Serikat, beasiswa pendidikan militer dan non-militer Amerika Serikat kepada Perwira TNI dihentikan. Embargo militer itu juga melarang penjualan alat-alat utama sistem persenjataan dan suku cadang pesawat

⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar dan Metode Tehnik*, Tarsito, Bandung, 1980, hal 15.

tempur kepada Indonesia⁹. Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi kekuatan pertahanan dan keamanan militer Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia terus mengupayakan pemulihan hubungan militernya dengan Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Persyaratan ini dicantumkan dalam suatu bentuk Amendeman yang disebut dengan *Amandemen Leahy*. Isi dari Amandemen Leahy adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen pertanggung jawaban atas peristiwa yang terjadi pasca pengumuman hasil jajak pendapat di Timor Timur.
2. Indonesia dituntut bekerjasama dalam penyelidikan dan pengadilan atas para anggota militer dan milisi Indonesia yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.
3. Bekerjasama dengan pemerintah transisi PBB di Timor Timur.
4. Memperlancar pemulangan para pengungsi Timor Timur.

Meskipun saat ini Timor Timur telah lepas dari Indonesia dan Indonesia telah mematuhi referendum dengan mengakui kedaulatan Timor Timur, Amerika Serikat tidak begitu saja menghentikan sanksi militernya terhadap Indonesia. Dan Indonesia terus melakukan upaya-upaya agar bisa memenuhi standart yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat.

⁹ Media Indonesia, *Pemulihan Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat*, Dokumen CSIS, September 1999.

¹⁰ Tempo, *AS Ajukan Syarat Bantuan Militer Indonesia*, Dokumentasi CSIS, 12 April 2001

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah, *"Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia agar Amerika Serikat menghentikan embargo militernya?"*

1.4. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam memecahkan permasalahan diperlukan kerangka dasar pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam membahas permasalahan serta memberikan dukungan terhadap hipotesa.

Dengan berangkat dari definisi yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka penulis berusaha menganalisa permasalahan yang ditetapkan dengan menggunakan **Konsep Power**. Menurut Nicholas J. Spykman:¹¹

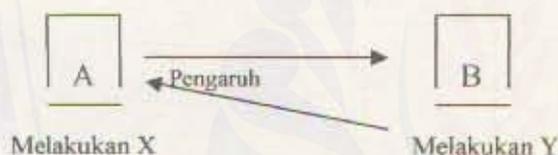
"All civilized live rest in the last instance of power, power is the ability to move men in desired fashion, through persuasion, purchase, barter, and coercion." (Semua kehidupan yang beradap pada akhirnya bertumpu pada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang kearah suatu kegiatan yang dikehendaki melalui persuasi, imbalan, barter, dan paksaan)

Persuasi merupakan pembahasan suatu usulan dengan pihak lain dan mendapatkan tanggapan yang menguntungkan tanpa dengan tegas mengajukan imbalan atau ancaman hukuman. *Persuasi* dapat juga mencakup protes dan penolakan yang tidak melibatkan ancaman nyata. *Imbalan*, Dalam hal ini, suatu negara berjanji melakukan sesuatu yang menguntungkan bila negara lain memenuhi keinginannya. *Barter*, dalam hal ini kredibilitas negara yang satu tidak terlalu tinggi terhadap negara yang lain. Negara A akan melakukan sesuatu untuk kepentingan negara B bila negara B juga memenuhi keinginan negara A. Dan

¹¹ James E. Dougherty, et. All, *Contending Theories International Relation, A Comperhensive Survey*, Harper & Row, New York, hal 87.

yang terakhir adalah *paksaan*, dalam situasi ini, paksaan digunakan oleh suatu negara untuk mengubah sikap negara lain dengan menggunakan kekuasaan ataupun kekuatan yang dimilikinya.

Kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain. Konsep kekuasaan dapat diuraikan kedalam tiga unsur analisis, yaitu; (1) tindakan untuk mempengaruhi negara lain, (2) sumber yang digunakan untuk membuat pengaruh yang dipunyai berhasil, (3) tanggapan terhadap tindakan itu.¹² Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar diatas dapat dijelaskan; *pertama*, pelaksanaan pengaruh oleh A terhadap B mengacu pada kemampuan A untuk mengubah perilaku B agar melakukan X, *kedua*, jika B mematuhi A untuk melakukan X, akan mengakibatkan A mengubah perilakunya sendiri untuk melakukan sesuatu demi kepentingan B. Hal ini menunjukkan hubungan timbal balik yang mungkin terjadi jika sebuah negara menerapkan pengaruhnya terhadap negara lain. Sekecil apapun kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara, tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi negara lain untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan negaranya.

¹² K.J. Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 159.

Menurut *Klaus Knorr*, power, pengaruh dan interdependensi saling terkait. Hubungan antara dua negara bisa berada dalam situasi konflik dalam hal-hal tertentu, tetapi pada saat yang sama bekerjasama dalam hal-hal yang lain. Ketika mereka bekerjasama, mereka akan memperoleh keuntungan dari nilai-nilai baru, baik materi maupun nonmateri. Bila mereka berada dalam situasi konflik, mereka berusaha memperoleh nilai dengan merugikan satu sama lain. Akan tetapi dalam keadaan konflik ataupun bekerjasama, mereka saling bergantung.¹³

Interdependensi mempunyai konotasi kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain dengan suatu cara. Apabila interdependensi itu bersifat timbal balik, masing-masing bisa mempengaruhi satu sama lain atau bahkan memutuskan hubungan tanpa ada pertimbangan macam-macam. Dengan demikian kerugian dan keuntungan penggunaan power oleh masing-masing pihak dalam hubungan interdependensi akan meningkat ketika tingkat interdependensi bertambah.

Menurut James A. Coparaso, hakekat dependensi mencakup:¹⁴

1. Besarnya kepentingan negara dependen terhadap suatu barang.
2. Kuatnya penguasaan atas barang yang diperlukan oleh pihak yang menjalankan pengaruh.
3. Kemampuan negara dependen untuk mencari sumber alternative lain bagi komoditas yang menjadikannya tergantung kepada negara lain

¹³ Klaus Knorr, *The Power of Nations: The Political Economy of International Relations*, New York: Basic Books, 1975, hal 3.

¹⁴ James A. Coparaso, *Dependence, Dependency, and Power in The Global System*, International Organization, Vol 32, Winter 1978, hal 32.

Secara umum dapat digambarkan, suatu negara yang membutuhkan sesuatu dari negara lain akan mudah dipengaruhi. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada Amerika Serikat akan pengadaan perlengkapan militer, Indonesia tidak memiliki alternative lain untuk menghentikan embargo militer Amerika Serikat selain memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat.

Konsep selanjutnya yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah **Konsep Bantuan Luar Negeri**. Bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.

K.J. Holsti mengungkapkan dalam teorinya mengenai bantuan luar negeri sebagai sarana yang mempunyai arti penting dalam hubungan dan kerjasama antar negara. Program-program bantuan luar negeri sama-sama memberikan manfaat baik kepada negara penerima maupun negara donor itu sendiri. Negara penerima menerima uang, pinjaman, bahan dan pengetahuan, yang diharapkan dapat menciptakan perekonomian modern, stabilitas politik, atau keamanan militer. Sedangkan negara donor, tanpa memandang tipe syarat-syarat yang mereka lekatkan pada bantuan mereka, biasanya berharap akan menerima dividen politik atau komersil dengan segera atau dalam jangka panjang.

Ada empat tipe utama program bantuan luar negeri: (1) bantuan militer, (2) bantuan teknis, (3) program hibah (pemberian) dan Impor komoditi, dan (4) pinjaman pembangunan.¹⁵ Bantuan militer merupakan bentuk bantuan yang mempunyai manfaat pengendalian tetap. Negara penerima tidak hanya tergantung kepada negara donor untuk menciptakan kekuatan militer modern, tetapi mereka

¹⁵ *Ibid*, hal 248.

tidak dapat mengoperasikan kekuatan itu secara efektif tanpa bantuan negara donor untuk memberikan pelatihan yang diperlukan, pengadaan suku cadang maupun jasa pemeliharaan.

Bantuan teknis dirancang untuk lebih menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Dampak program ini sangat besar, sementara biayanya relatif murah. Program yang ketiga, program pemberian tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali secara ekonomi. Tetapi dengan munculnya masalah bagi negara donor maupun negara penerima yang diakibatkan dari program bantuan ini, negara-negara besar pemberi bantuan menggantinya dengan pinjaman jangka panjang. Sedangkan bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman menggambarkan pengalihan dana jangka pendek. Pinjaman dapat dipergunakan untuk mendapatkan pengaruh atas negara-negara penerima

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan luar negeri dapat dipergunakan untuk menciptakan suatu ketergantungan terhadap negara lain. Jika tingkat ketergantungan suatu negara tinggi, maka negara tersebut akan mudah dipengaruhi.

Dalam hal ini Amerika Serikat menggunakan kapabilitasnya sebagai negara adidaya untuk menekan Pemerintah Indonesia agar segera melakukan perubahan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dengan membekukan bantuan militer, atau pemberlakuan embargo militer, secara langsung telah mempengaruhi kekuatan militer Indonesia, karena selama ini sebagian besar perlengkapan militer Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Dan Indonesia akan melakukan upaya untuk menjaga kekuatan militernya dengan cara melakukan apa saja persyaratan

yang ditetapkan Amerika Serikat agar Amerika Serikat menghentikan embargo militernya.

1.5 Hipotesa

Hipotesa diperlukan dalam setiap penulisan ilmiah karena hipotesa merupakan konsekuensi logis dari teori. Hipotesa diperlukan sebagai usaha untuk menentukan alternatif yang mendekati kebenaran dari berbagai dugaan yang ada. Kebenaran yang ada dalam suatu hipotesa merupakan kebenaran yang membutuhkan suatu pembuktian.

Hubungan militer antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang telah lama terjalin, telah mengalami perubahan sejak adanya krisis di Timor Timur. Hal ini telah mempengaruhi kondisi militer Indonesia. Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh embargo itu tidak tergolong vital, namun hal ini tidak dapat dibiarkan, karena dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat dan juga mempengaruhi kekuatan militer dalam menyelenggarakan pengamanan dan pertahanan negara. Indonesia terus berupaya agar Amerika Serikat mencabut embargonya, namun Amerika Serikat mengajukan persyaratan pemulihan hubungan militernya dengan Indonesia yang tercantum dalam Amandemen Leahy. Sikap kooperatif yang ditunjukkan pemerintah Indonesia membuat Amerika Serikat mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan militernya terhadap Indonesia dan sedikit melonggarkan embargo senjatanya.

Namun meskipun Amerika Serikat melonggarkan embargonya, Amerika Serikat belum sepenuhnya mencabut embargo persenjataan dan peralatan militernya terhadap Indonesia, Indonesia masih kesulitan memperoleh peralatan

yang dibutuhkan. Konggres masih tetap memberlakukan pelarangan bantuan militer bagi Indonesia. Senator Patrick Leahy, yang merupakan pemrakarsa Leahy Amandement, bersikeras menentang pencairan bantuan dengan alasan militer Indonesia masih menentang pemerintahan sipil dan belum menunjukkan tanda-tanda telah memenuhi standar pelaksanaan hak asasi manusia. Menurut Leahy, seharusnya Amerika Serikat memberikan bantuan untuk program lain dan tidak perlu membantu militer Indonesia¹⁶.

Meskipun Indonesia memiliki alternatif lain dalam hal pengadaan perlengkapan militer, yaitu dengan membeli perlengkapan militer dari negara lain dan juga meningkatkan produksi dalam negeri, namun persoalan embargo militer yang diberlakukan Amerika Serikat tetap menjadi perhatian utama untuk dapat diselesaikan.

Dari uraian diatas maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

“Indonesia berupaya menghentikan embargo militer Amerika Serikat dengan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Amerika Serikat.”

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan adanya suatu penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan atau menerangkan fenomena. Untuk dapat memahami fenomena, seorang peneliti juga harus menghubungkan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain sehingga diperlukan data-data untuk dianalisis.

¹⁶ <http://www.kompas.com/kompas>

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat tulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbentuk observasi tidak langsung sehingga data yang dihasilkan merupakan data sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan surat kabar, serta informasi-informasi yang ada di internet. Dengan demikian, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian perpustakaan (Library Research).

Untuk mendapatkan data-data sekunder tersebut, peneliti melakukan penelitian di beberapa perpustakaan, antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Gajah Mada.
4. Perpustakaan CSIS Jakarta.
5. Redaksi Harian Kompas.

1.6.2. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu analisa data yang tidak dapat diukur secara langsung. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan cara berpikir deduktif. Dalam metode deduktif ini, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum tersebut akan diterangkan peristiwa-peristiwa yang khusus atau merupakan penjelasan teoritis yang umum atas fakta yang konkret.

Melalui cara berpikir deduktif ini, penulis menganalisa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Amerika Serikat menjatuhkan embargo militernya kepada Indonesia serta dampak yang ditimbulkan sehingga menyebabkan Indonesia melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kembali hubungan militernya dengan Amerika Serikat.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan agar dapat membantu mempermudah menganalisa suatu permasalahan. Pendekatan ini akan membuat penelitian menjadi lebih spesifik. Dalam hal ini penulis mendasarkan pendekatan pada kerangka penelitian *realis* yang menyatakan bahwa politik merupakan alat untuk mendapatkan power. Realisme dalam hubungan internasional memiliki empat asumsi pokok¹⁷, *pertama*, negara sebagai pelaku utama sekaligus pelaku terpenting, *kedua*, negara dipandang sebagai unitary actor, *realis* melihat bahwa sebuah negara adalah otoritas tertinggi yang diwujudkan dalam sebuah pemerintahan yang menyuarakan kepentingan nasionalnya, *ketiga*, negara secara esensial diasumsikan sebagai aktor yang rasional dalam proses pembuatan politik luar negeri yang mencakup perumusan tujuan, pertimbangan alternatif dalam pembuatan keputusan, *keempat*, *realis* menempatkan aspek keamanan nasional pada urutan pertama dalam isu internasional.

¹⁷ Andre H. Pareira, *Negara Dalam Studi Hubungan Internasional: Perubahan dan Kesenambungan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

Hans J. Morgenthau mengemukakan 6 prinsip pemikiran realis, yaitu¹⁸:

1. Realisme politik menganggap bahwa politik, seperti masyarakat pada umumnya dikendalikan oleh hukum-hukum obyektif yang berakar pada hakekat manusia. Dalam hal ini teori realisme meliputi pembuktian fakta dan pemberian arti melalui kemampuan berpikir.
2. Petunjuk utama yang membantu realisme politik untuk menemukan bentangan politik internasional ialah konsep kepentingan yang diartikan dalam istilah kekuasaan.
3. Konsep utama realis tentang kepentingan yang ditegaskan sebagai kekuasaan merupakan kategori obyektif yang berlaku secara universal tanpa memberikan arti terhadap konsep tersebut secara definitif.
4. Realisme politik menyadari pentingnya moral dalam tindakan politik, prinsip moral yang universal tidak dapat diterapkan pada tindakan-tindakan negara akan tetapi harus disaring melalui keadaan, waktu, dan konkret.
5. Realisme politik menolak mengidentifikasi cita-cita moral bangsa dengan hukum-hukum moral yang menguasai alam semesta.
6. Realisme politik menempatkan norma-norma politik diatas norma-norma lain.

Pendapat yang dikemukakan diatas memberikan gambaran bahwa upaya suatu negara untuk mempengaruhi negara lain didasarkan pada kekuatan yang bisa dimiliki oleh negara tersebut. Dan dilain pihak, untuk negara yang

¹⁸ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal 5

dipengaruhi, tergantung pada keuntungan dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari penerapan kekuasaan yang dilakukan negara yang memberikan pengaruh.



BAB II

LATAR BELAKANG PEMBERLAKUAN EMBARGO MILITER

AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA

2.1. Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Pemberlakuan embargo militer yang dilakukan Amerika Serikat berkaitan langsung dengan masalah pelaksanaan hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana cara pandang Amerika Serikat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Pemberlakuan embargo senjata itu juga tidak terlepas dari politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia.

2.1.1. Gambaran Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia telah menjadi topik perhatian di dunia Internasional. Hak Asasi manusia tidak hanya menjadi sekedar masalah hak dalam pengertian yang murni saja, tetapi hak asasi manusia telah menjadi suatu alat politik yang dapat digunakan untuk memojokkan ataupun mengalahkan lawan. Paham tentang hak asasi manusia seringkali menjadi perdebatan karena tentunya setiap negara mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pengertian hak asasi manusia.

Hak asasi manusia memasuki teori dan praktek politik pada abad ke-17. *Second Treatise of government* karya John Locke menyajikan teori pertama yang kemudian berkembang menjadi hak-hak kodrati manusia.¹ Teori ini dimulai

¹ Robert Holden, et. all, *Hak Asasi Manusia, sebuah pengantar*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1998, hal 4.

dengan kondisi sosial individu yang ingin menikmati hak-hak mereka dengan membentuk sebuah masyarakat yang memiliki pemerintahan, dengan demikian akan dapat memungkinkan mereka menikmati hak-hak individu, seperti hak akan kebebasan, kehidupan dan kekayaan. Menurut Locke, pemerintahan itu sah apabila pemerintahan tersebut mampu melindungi dan memajukan pemanfaatan hak-hak asasi manusia oleh rakyatnya.

Gagasan hak asasi manusia semakin lama semakin berkembang. Semula, hak-hak tersebut hanya berkaitan dengan kaum bangsawan, kemudian berkembang karena adanya tuntutan persamaan hak yang berdasarkan pada persamaan kodrati manusia. Pada abad ke-19, tuntutan kaum pekerja untuk mendapatkan upah yang pantas, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman semakin memperluas pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Sedangkan pada abad ke-20, kolonialisme menjadi masalah yang sangat penting. Perjuangan untuk menghilangkan deskriminasi berdasarkan ras, hak untuk hidup bebas merdeka terlepas daritekanan negara lain menjadi sangat menonjol. Tuntutan agar mendapatkan hak yang memberikan kebebasan, persamaan dan rasa aman menjadi hak bagi setiap manusia.

Pada masa pasca perang dingin, dengan meluasnya demokrasi dan liberalisasi, semakin banyak pemerintah didunia dituntut untuk selalu memperhatikan masalah hak asasi manusia. Bahkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung terus menerus dapat mengurangi keabsahan sebuah pemerintahan baik nasional maupun internasional. Hak asasi manusia telah menjadi suatu patokan dalam hubungan antar negara. Pada masa perang dingin,

hak asasi manusia hanya menjadi sebuah senjata lain dalam pertarungan ideologi, namun berakhirnya perang dingin telah menempatkan masalah hak asasi manusia sebagai masalah utama yang harus diperhatikan dalam hubungan internasional.

Salah satu organisasi hak asasi manusia yang berada di Eropa yaitu OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) bertekad untuk memperjuangkan masalah hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam menjalankan tugasnya, organisasi tersebut memiliki 10 prinsip utama yang tertuang dalam sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Helzinki. Adapun 10 prinsip tersebut adalah :²

1. Menghormati kedaulatan negara.
2. Menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Terdapat batas-batas yang tak boleh dilanggar.
4. Integritas wilayah negara-negara.
5. Penyelesaian pertikaian secara damai.
6. Tidak mencampuri masalah dalam negeri suatu negara.
7. Menghormati hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar, termasuk kebebasan berpikir, suara hati, beragama, dan keyakinan.
8. Kesamaan derajat rakyat serta hak untuk menentukan nasib sendiri.
9. Kerjasama diantara negara-negara.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum internasional dengan itikad baik.

Persetujuan Helzinki telah menjadi panutan bagi organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya untuk menghimpun pengakuan atas hak asasi manusia

² *ibid*, hal 11

dibagian dunia lainnya sehingga hak asasi manusia tidak lagi menjadi urusan dalam negeri suatu negara, tetapi telah menjadi paradigma baru dimana hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan yang memiliki pedoman-pedoman internasional.

2.1.2. Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar negeri merupakan sikap dan kepentingan suatu negara terhadap lingkungan eksternal, politik luar negeri merupakan sebuah strategi dasar untuk mencapai kepentingan nasional diluar batas wilayahnya. Sasaran politik luar negeri pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasional dalam forum internasional.

Amerika Serikat telah memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran praktek-praktek dan ide-ide tentang hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, menegaskan bahwa hak suatu bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, lepas dari tekanan ataupun ikatan dari bangsa lain. Amerika Serikat memiliki catatan panjang tentang tindakan intrnasional demi hak-hak asasi manusia. Selama perang dingin, Amerika Serikat mendukung tindakan-tindakan penindasan para pemimpin dunia selama ia mengatasnamakan anti komunis dalam menjalankan pemerintahannya.³

Pasca perang dingin, politik luar negeri Amerika Serikat mulai mengalami pergeseran. Semula politik luar negeri amerika Serikat hanya berorientasi untuk menangkal perluasan paham komunis Uni Soviet, tetapi setelah runtuhnya negara itu, Amerika Serikat lebih memfokuskan diri pada masalah demokratisasi,

³ *Ibid*, hal 19.

lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Amerika Serikat seringkali mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokratisasi di seluruh dunia dan juga perlindungan hak asasi manusia. Politik luar negeri Amerika Serikat berdasarkan pemikiran bahwa Amerika Serikat akan membawa kebajikan kepada dunia.

Tekad Amerika Serikat untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi diseluruh dunia semakin dipertegas dengan munculnya doktrin Carter (1980) yang berusaha mengkaitkan masalah penegakkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain. Amerika Serikat tak segan memberikan tekanan yang berupa sanksi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia. Dengan kata lain, Amerika Serikat mempertimbangkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam menetapkan kebijakan luar negerinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan amerika Serikat didunia Internasional. Kepentingan-kepentingan tersebut berupa :⁴

1. Kepentingan Strategi

Strategi negara Amerika Serikat dalam rangka menciptakan stabilitas nasional, keamanan dan ketentraman rakyat semaksimal mungkin atau dalam rangka menyelamatkan posisi Amerika Serikat diantara bangsa-bangsa diseluruh dunia.

⁴ Hasan Qathamsy, *Amerika Diktator Dunia*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.2001,hal 47

2. Kepentingan Keamanan

Langkah-langkah radikal dan represif untuk memelihara seluruh kepentingan Amerika Serikat, seperti menjaga hubungan dengan negara-negara sekutu dan mengawasi perdamaian dunia

3. Kepentingan Politik dan Taktik

Langkah dan kebijakan Amerika Serikat untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh politik Amerika Serikat didunia dan juga dimedia massa internasional. Kepentingan nasional merupakan simbol kebijakan paling utama Amerika Serikat yang tampak dari pernyataan Presiden, Menteri, Pejabat Negara maupun rakyat biasa.

Tipe tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam melakukan tekanan terhadap sebuah negara yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia dapat berupa,

1. Protes yang bersifat rahasia kepada pemerintah yang bersangkutan.
2. Protes bersama yang dibuat dengan pemerintah negara-negara lain.
3. Pernyataan keprihatinan yang terbuka dalam parlemen atau ditempat lain.
4. Dukungan bagi badan-badan seperti komisi PBB untuk penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia disuatu negara.
5. Pembatalan atau penundaan kunjungan pejabat negara.
6. Pengekangan kontak-kontak budaya dan olahraga.
7. Pengurangan program bantuan.
8. Penghentian semua bantuan.
9. Pelarangan penjualan senjata.

10. Sanksi ekonomi.

11. Pemutusan hubungan diplomatik.

2.1.3. Kongres dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat terdiri dari dua kamar yaitu, House of Senate dan House of Representative. Senat tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh parlemen daerah atau negara bagian. Senat dipandang sebagai wakil negara-negara bagian, dan setiap negara bagian mempunyai dua wakil (senator). Sedangkan jumlah anggota house of representative ditentukan oleh kongres yang kemudian dibagi antara negara-negara bagian menurut jumlah penduduk. Tugas utama Senat adalah untuk mengontrol atau memastikan negara-negara yang mereka wakili diperlakukan adil oleh negara federasi.

Setiap kamar dalam kongres memiliki kekuasaan untuk mengusulkan rancangan undang-undang mengenai masalah apa saja, kecuali anggaran pendapatan khusus menjadi kekuasaan house of representative. Senat juga memiliki kekuasaan tertentu, terutama otoritas untuk menunjuk pejabat tinggi pemerintah federal, mengadakan persetujuan dan pembuatan perjanjian dengan negara lain. Namun secara keseluruhan kongres mempunyai kekuasaan yang disebut constituent power:

1. Non legislative power (mengamandemen konstitusi)
2. Electoral power (bila pemilihan presiden terjadi deadlock)
3. Control over administration (mengontrol jalannya pemerintahan)
4. Investigative power (mengadakan investigasi terhadap pemerintah)
5. Legislative power (merupakan kekuasaan yang utama)

Kongres menjadi sasaran dari berbagai pengaruh lain seperti presiden, kelompok penekan (LSM dan kelompok kepentingan), partai politik dan juga pejabat lokal (negara bagian). Tekanan terhadap kongres dari berbagai pihak yang menginginkan suatu kemudahan atau kepentingan dari produk legislatif sangat berpengaruh terhadap keputusan pembuatan rancangan undang-undang yang akan disahkan maupun terhadap pembuatan kebijakan luar negeri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kongres dalam pembuatan kebijakan luar negeri antara lain, faktor-faktor sosial yang terdiri dari kelompok kepentingan dan media massa. Meningkatnya aktivitas kelompok kepentingan memberi semakin banyak masukan yang bermanfaat bagi kongres dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif. Sedangkan media massa berperan menjadikan anggota kongres sebagai salah satu sumber berita dan informasi yang dibutuhkan untuk melayani tuntutan dan aspirasi para constituent, sehingga dengan pemberitaan besar seorang anggota kongres akan mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan ditingkat eksekutif. Disamping itu terdapat pula faktor institutional. Faktor ini berasal dari dalam tubuh kongres dalam bentuk peningkatan pengaruh komisi tetap dan subkomisi yang mengurus kebijakan luar negeri.⁵

⁵ Dr. Bambang Cipto, M.A. *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hal 217.

Adapun prosedur dalam pembuatan kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa cara, antara lain:

1. Prosedur mempengaruhi kebijakan

Kongres memproses undang-undang dengan peraturan dan prosedur yang kompleks yang menyangkut lembaga dan setiap kebijakan umum.

2. Suatu keputusan mengenai kebijakan disahkan atau dinyatakan sebagai gerakan prosedural. Anggota House of representative dan senator tidak akan membuat keputusan yang ceroboh atas masalah yang jauh menjangkau masyarakat.

3. Hakekat kebijakan bisa menentukan penggunaan prosedur tertentu. House of representative dan senat biasanya mempertimbangkan proposal non kontroversial dibawah prosedur-prosedur yang cepat, sedangkan proposal yang kontroversial melibatkan musyawarah yang panjang.

2.2. Krisis Timor Timur

Krisis yang terjadi di Timor Timur merupakan alasan utama Amerika Serikat memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia. Konflik yang terjadi di wilayah itu selama hampir 23 tahun menimbulkan tuduhan dari dunia internasional tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak Indonesia. Sejak pertama kali Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur telah menimbulkan pro dan kontra dari negara-negara lain.

Pada tahun pertama Indonesia memasuki wilayah itu, sebenarnya Amerika Serikat memberikan dukungan meskipun tidak secara terang-terangan. Amerika

Serikat melakukannya karena salah satu partai terbesar di Timor Timur beraliran komunis, sehingga Amerika Serikat yang pada waktu itu masih terlibat perang dingin berorientasi penuh untuk menghambat penyebaran paham komunis di seluruh dunia.

Akan tetapi berakhirnya masa perang dingin, ditambah lagi dengan berbagai peristiwa berdarah yang terjadi di Timor Timur, kebijakan Amerika Serikat mulai mengalami perubahan. Dan puncaknya adalah pemberlakuan embargo militer pada tahun 1999.

2.2.1. Sejarah Konflik Timor Timur

Sejak awal, persoalan Timor Timur menjadi suatu masalah yang menyulitkan bagi pemerintah Indonesia. Dimulai dengan kondisi politik yang tidak menentu menjelang penarikan pemerintah kolonial Portugal dari kawasan tersebut menimbulkan reaksi yang berlainan dari penduduk Timor Timur sendiri maupun dari pemerintah Indonesia. Indonesia berusaha menarik wilayah itu karena letak geografisnya berdekatan dengan wilayah Indonesia. Sedangkan di Timor Timur sendiri muncul beberapa partai politik yang mempunyai visi berbeda. Partai-partai tersebut adalah Fretilin yang merupakan kelompok yang menghendaki kemerdekaan. UDT (Unilao Democratia Timorence), merupakan kelompok yang menghendaki kelanjutan hubungan dengan Portugal. Sedangkan Apodeti (Associao Popular Democratia Timorence) merupakan kelompok yang mendukung prospek integrasi dengan Indonesia.

Salah satu kelompok politik tersebut diindikasikan sebagai kelompok yang condong pada pemikiran Marxis. Bahkan salah satu tokoh Fretilin yang berada di

pengasingan menegaskan bahwa Fretilin merupakan kelompok yang digerakkan oleh intelektual-intelektual beraliran kiri. Sedangkan tulang punggung ideologi pada waktu itu adalah anti komunis. Berdasarkan pemikiran anti komunis tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebagai akibat kekhawatiran akan timbulnya basis komunis di wilayah Timor Timur. Berdasarkan itu pula pemerintah Amerika Serikat mendukung intervensi Indonesia meskipun dilakukan secara diam-diam. Amerika Serikat yang masih terlibat perang dingin mengkhawatirkan timbulnya basis komunis di wilayah Asia.

Situasi politik Timor Timur sebelum invasi Indonesia sangat tidak stabil. Pada awal tahun kepergian Portugal dari daerah itu, UDT, kelompok yang menghendaki kelanjutan hubungan dengan Portugal, menjalin kerjasama dengan Fretilin yang pro kemerdekaan. Akan tetapi hal ini tidak bertahan lama, karena pada pertengahan tahun, UDT menginginkan integrasi dengan Indonesia. Pada bulan September 1975, konflik semakin memuncak yang mengakibatkan pecahnya perang saudara dan diakhiri oleh kemenangan Fretilin. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin menyatakan kemerdekaan Republik Demokrasi Timor-Timur.

Pada awal Desember 1975, pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan kemungkinan invasi. Dan pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan kekuatan militer penuh melalui Operasi Seroja untuk merebut Timor-Timur dari penguasaan Fretilin. Hal ini dilakukan sehari setelah Presiden Amerika Serikat, Gerald Ford dan menteri luar negeri Henry Kissinger bertemu dengan Presiden

Soeharto di Jakarta.⁶ Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia tidak perlu merasa khawatir akan kebijakan yang telah dilakukan dalam intervensi terhadap Timor-Timur karena adanya dukungan dari Amerika Serikat. Setelah berhasil merebut Timor-Timur dari penguasaan Fretilin, maka berdasarkan Undang-Undang No.7 tertanggal 17 Juli 1976, Timor-Timur disyahkan sebagai propinsi ke-27.

Akan tetapi upaya penetapan status Timor Timur kedalam wilayah Indonesia belum mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Upaya dalam forum PBB juga mengalami hambatan, hal ini dikarenakan kubu pro-kemerdekaan yang mendapat dukungan dari Portugal masih terus bergerilya menentang integrasi dengan Indonesia. Dalam sidang umum PBB, masalah Timor Timur menjadi agenda pembicaraan yang cukup panjang, karena negara-negara anggota PBB masih belum sepenuhnya menyetujui aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur.

Pada tanggal 12 November 1991 terjadi Tragedi Santa Cruz yang menewaskan sejumlah pemuda Timor Timur. Peristiwa tragis tersebut cepat menyebar, sehingga menyebabkan negara-negara lain menuntut Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan. Pimpinan ABRI selaku pihak berwenang mengatakan jumlah korban hanya puluhan orang, akan tetapi masyarakat Timor Timur memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan orang. Akibatnya masyarakat yang tidak puas menuntut Pemerintah Indonesia dan hal ini menyebabkan gerakan anti integrasi semakin menyebar. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI mulai dijadikan senjata untuk menyudutkan Pemerintah

⁶ *ibid*, hal 41.

Indonesia. Tragedi Santa Cruz tersebut semakin menyulitkan upaya Indonesia dalam pengakuan status Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan Pemerintah Amerika Serikat mulai mengurangi dukungannya terhadap Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pembekuan program IMET (International Military Education and Training) pada tahun 1992.

Posisi Indonesia menjadi semakin sulit setelah pada tahun 1996, Uskup Belo dan Ramos Horta yang merupakan tokoh perjuangan Timor Timur mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Uskup Belo mendapatkan Nobel Perdamaian karena dianggap telah mempertaruhkan jiwa dalam melindungi rakyat Timor Timur dari tekanan. Sementara Ramos Horta, telah memperjuangkan hak-hak rakyat Timor Timur di dunia Internasional. Penghargaan Nobel Perdamaian kepada kedua tokoh Timor Timur tersebut mendapatkan perhatian dari dunia internasional, bahkan anti integrasi semakin banyak mendapatkan dukungan. Di dalam wilayah Timor Timur sendiri tak hanya tidak hanya permintaan otonomi saja yang muncul tetapi juga tuntutan untuk menentukan nasibnya sendiri.

2.2.2. Pilihan Referendum dan Kondisi Keamanan Timor Timur

Situasi di Timor Timur hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto tidak banyak mengalami perubahan. Meskipun banyak tuntutan dari pihak luar maupun dari dalam wilayah Timor Timur sendiri untuk melepaskan diri dari Indonesia, Pemerintah tetap mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Pembangunan tetap dilaksanakan di wilayah itu seiring dengan penumpasan terhadap gerakan pengacau keamanan, Fretilin. Tetapi setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto yang digantikan oleh B.J.

Habibie, kebijakan Indonesia terhadap masalah Timor Timur mulai mengalami perubahan.

Pada awal Agustus 1998, melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Presiden B.J. Habibie menawarkan status otonomi yang diperluas. Tapi tawaran tersebut tidak terlaksana karena pihak pro-kemerdekaan menginginkan merdeka sepenuhnya dan lepas dari wilayah Indonesia. Indonesia mengadakan beberapa pertemuan melalui forum PBB untuk membahas masalah tersebut tapi selalu menemui hambatan. Hal ini dimungkinkan karena keberhasilan Ramos Horta dalam mendominasi dukungan dari negara anggota yang hadir dalam pertemuan.

Pada awal 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Presiden Habibie tidak lagi hanya menawarkan status otonomi luas terhadap Timor Timur, tetapi juga menawarkan pemisahan diri dari wilayah Indonesia dan menjadi negara merdeka. Pernyataan yang dikeluarkan Presiden Habibie menimbulkan berbagai reaksi dari dalam maupun luar negeri. Para pejuang kemerdekaan dan pembela hak asasi manusia mendukung keputusan Presiden Habibie, akan tetapi reaksi sebaliknya ditunjukkan oleh para pejuang integrasi karena selama 23 tahun mempertahankan Timor Timur seakan tidak ada artinya sama sekali.

Presiden Habibie menjelaskan bahwa kebijakannya mengenai Timor Timur didasari oleh beberapa alasan, diantaranya:⁷

1. Untuk memberikan kebebasan diatas prinsip kemerdekaan kepada setiap manusia Indonesia yang berada di bumi Indonesia.

⁷ Lela E. Madjiah, *Timor-Timur, Perginya Si Anak Hilang*. Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 8.

2. Indonesia dibangun diatas wilayah bekas jajahan Belanda, tetapi Timor Timur merupakan bekas jajahan Portugal, jadi pada dasar bernegara ataupun secara hukum, Timor Timur tidak ada dasarnya. Walaupun ada ketetapan MPR, tapi tidak otentik dalam UUD 1945 sebagai konstitusi.
3. Fakta bahwa PBB tidak pernah mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia.

Akan tetapi, apapun alasan yang digunakan oleh Presiden Habibie dalam membuat kebijakan mengenai pilihan referendum bagi Timor Timur telah menimbulkan masalah baru di wilayah itu. Setelah opsi referendum dikeluarkan, timbul berbagai ketegangan, perpecahan bahkan peperangan. Ketegangan antara pendukung pro-integrasi dan pro-kemerdekaan semakin meningkat. Bila kelompok pro-kemerdekaan memilih jalur politik dan diplomasi untuk mendukung gerakan mereka, kelompok pro-integrasi yang merasa dikhianati memilih jalur kekerasan. Bentrok diantara kedua kelompok tersebut hampir selalu terjadi dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Peristiwa menggemparkan dunia internasional kembali terjadi pada awal April 1999, ketika Uskup Belo menyatakan telah terjadi pembantaian terhadap pendukung kemerdekaan Timor Timur digereja Liquica yang menewaskan 45 orang. Menurut Belo, terdapat lebih dari 2000 orang yang berada di gereja ketika terjadi penyerangan yang dilakukan, tetapi menurut pihak yang berwenang hanya terdapat 400 hingga 500 orang dan tempat kejadian di kediaman Pastor Rafael yang kebetulan berada didekat gereja, bukan di gereja seperti yang dikatakan

Uskup Belo.⁸ Terlepas dari perbedaan pernyataan tentang peristiwa Liquica, peristiwa tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Masyarakat dan Pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan reaksi tentang peristiwa itu. Amerika Serikat juga mendesak Indonesia untuk menerima tim pengawas internasional di Timor Timur untuk membantu mengurangi ketegangan di wilayah itu. Akan tetapi Indonesia menolak tuntutan bagi kehadiran pasukan perdamaian PBB karena masalah Timor Timur masih merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan masalah keamanan merupakan tanggung jawab Indonesia.

Untuk meredam aksi kekerasan yang terjadi di Timor Timur, Indonesia berupaya mengadakan kesepakatan penghentian permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Militer Indonesia juga berusaha melucuti senjata para pejuang pro-integrasi. Sedangkan untuk persiapan jajak pendapat dilakukan oleh PBB dengan membentuk UNAMET. Tetapi pihak pro-integrasi meragukan kenetralan UNAMET, dikarenakan staf lokal yang mereka rekrut banyak yang berasal dari pihak pro-kemerdekaan sehingga menimbulkan anggapan bahwa jajak pendapat dilakukan hanya dengan satu tujuan, yaitu melepaskan Timor Timur dari Indonesia.

Pada masa kampanye dan pendaftaran, UNAMET mengungkapkan bahwa milisi pro-integrasi melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap lawan politik mereka. Milisi pro-integrasi terus berupaya mengganggu jalannya kampanye kelompok pro-kemerdekaan dan berupaya agar rakyat menyingkir dari wilayah Timor Timur.⁹ Pernyataan UNAMET tersebut tentu saja sangat

⁸ *Ibid*, hal 20.

⁹ *Ibid*, hal 61.

menguntungkan pihak pro-kemerdekaan, menyudutkan kelompok pro-integrasi dan Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan selama 23 tahun mempertahankan Timor Timur tentu saja menimbulkan ikatan yang kuat antara kelompok pro-integrasi dengan militer Indonesia. Dan tindakan intimidasi yang dilakukan kelompok pro-integrasi tersebut akan selalu dikaitkan dengan militer Indonesia.

2.2.3. Kondisi Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat

Sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal dibawah pengawasan PBB pada tanggal 5 Mei 1999 di New York, ditetapkan bahwa jajak pendapat akan dilaksanakan pada bulan Agustus 1999. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keamanan menjelang dan selama jajak pendapat. Berdasarkan hal itulah Pemerintah Indonesia menolak tuntutan adanya kehadiran komisi internasional di Timor Timur, Timor Timur merupakan masalah dalam negeri Pemerintah Indonesia. Akan tetapi banyak pihak yang meragukan kenetralan militer Indonesia sehubungan dengan keterkaitan militer Indonesia dengan pihak pro-integrasi.

Jajak pendapat dilakukan pada tanggal 31 Agustus dan berlangsung cukup aman. Menurut data yang dikeluarkan PBB, 98,6% dari 438.417 penduduk yang mendaftarkan diri telah menggunakan hak pilihnya.¹⁰ Namun kelompok pro-integrasi terus menyatakan rasa tidak puas atas pelaksanaan jajak pendapat karena keberpihakan UNAMET. Ketidakpuasan kelompok pro-integrasi tersebut

¹⁰ *Ibid*, hal 82.

diwujudkan dalam bentuk kekerasan sehingga menimbulkan penilaian negatif dari dunia internasional.

Pengumuman hasil jajak pendapat dilakukan pada tanggal 5 September 1999. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh PBB menyebutkan bahwa 344.580 atau 78,5% rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi, sementara 94.388 atau 21,5% menerimanya. Pemerintah Amerika Serikat menekankan bahwa bila Indonesia tidak menerima hasil tersebut, maka IMF tidak akan mengucurkan dana bantuannya.¹¹ Menghadapai pernyataan tersebut, Pemerintahan Habibie tidak dapat berbuat banyak karena Indonesia sedang membutuhkan bantuan pinjaman internasional untuk memulihkan keadaan ekonomi. Meskipun hasil tersebut jauh dari perkiraan semula bahwa paling tidak separuh dari rakyat Timor Timur akan menerima paket otonomi. Ditambah lagi dengan adanya kecurangan yang dilakukan pihak UNAMET, akan tetapi dengan adanya tekanan internasional, Pemerintah Indonesia hanya bisa menerima hasil tersebut tanpa bisa berbuat banyak.

Pemerintah Indonesia menerima hasil jajak pendapat yang dikeluarkan oleh PBB, namun ketidakpuasan akan hasil jajak pendapat tersebut ditunjukkan oleh kelompok pro-integrasi dengan melakukan berbagai macam tindak kekerasan dan pembakaran di wilayah Timor Timur. Hal ini mereka lakukan sebagai wujud protes, mereka menganggap UNAMET melakukan kecurangan dengan memanipulasi kartu suara dan mendukung kelompok pro-kemerdekaan.

¹¹ *Ibid*, hal 52.

Menghadapai hal itu, Pemerintah Indonesia berupaya mengambil langkah antisipasi untuk mencegah aksi kekerasan dan balas dendam yang dilakukan kelompok pro-integrasi dengan mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu menjaga keamanan di ibukota Timor Timur. Bahkan Pemerintah Indonesia juga menerapkan darurat militer, darurat militer ini memberi landasan hukum bagi militer untuk bertindak keras dan tegas terhadap pelaku kerusuhan, kebrutalan dan pelanggaran hukum di Timor Timur. Penerapan darurat militer tersebut dilakukan karena Pemerintah Indonesia menilai kondisi Timor Timur sangat mengkhawatirkan.

Akan tetapi penerapan darurat militer tersebut tidak mampu membendung kemarahan pihak pro-integrasi yang merasa dikhianati dan dicurangi. Dunia internasional mengeluarkan reaksi keras terhadap rangkaian kekerasan tersebut. Dan Pemerintah Indonesia, terutama TNI menjadi terdakwa yang bertanggung jawab atas kerusuhan, pembakaran, pembunuhan serta bentuk kekerasan lain. Masyarakat internasional menganggap telah terjadi kolusi antara militer Indonesia dan pendukung pro-integrasi untuk memaksa penduduk Timor Timur mengungsi ke tempat lain. Akibatnya mereka mendesak agar Pemerintah Indonesia menerima kehadiran pasukan perdamaian PBB untuk memulihkan keamanan. Dan pada tanggal 20 September 1999, 1190 anggota International Force far East Timor (INTERFET) bersenjata lengkap mendarat di Dili untuk melancarkan operasi pemulihan keamanan dan Pemerintah Indonesia menarik pasukannya dari daerah itu.¹² Kedatangan pasukan Interfet diwilayah Timor

¹² *Ibid.*, hal 141.

Timor semakin menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia, terutama TNI benar-benar tidak dapat menangani keamanan di wilayah Timor Timur. Usaha keras yang dilakukan militer Indonesia untuk menjaga keamanan di Timor Timur berbalik menimbulkan tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

2.3. Kebijakan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat terhadap Indonesia Pasca Jajak Pendapat Timor Timur

Kebijakan hak asasi manusia Amerika Serikat didasarkan pada dua prinsip dasar, yaitu:¹³

1. Amerika Serikat tidak akan memaksakan bentuk masyarakat barat atau paham hak asasi manusia ala barat. Sebaliknya Amerika Serikat akan mendorong agar negara-negara lain mengikuti dan menjalankan hak asasi manusia sesuai ketentuan internasional yang pada umumnya juga diakui oleh negara-negara tersebut.
2. Amerika Serikat berpendapat bahwa memajukan hak asasi manusia merupakan kepentingan Amerika Serikat dan juga kepentingan seluruh bangsa. Keyakinan mereka berakar pada logika bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat di Asia dalam jangka panjang akan ditentukan oleh tatanan politik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

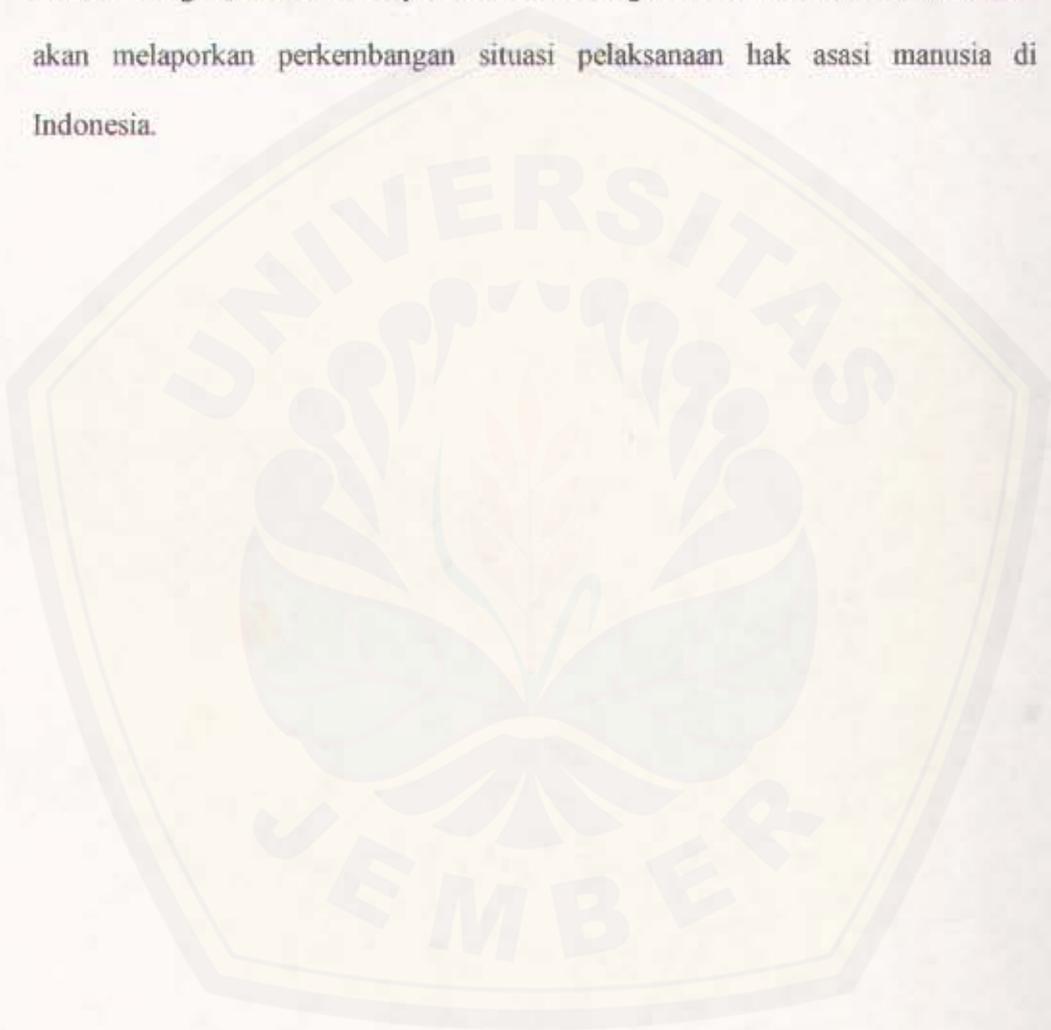
Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyusun pendekatan positif dan negatif untuk memerintahkan negara-

¹³ Dr. Bambang Cipto, M.A, *Op. cit.*, hal 200.

negara lain menjalankan hak asasi manusia sesuai dengan standard yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. *Pendekatan positif*, dilakukan Amerika Serikat dengan mengadakan pembicaraan bilateral maupun multilateral melalui forum PBB. Pembicaraan bilateral dilakukan dengan melibatkan pemerintah-pemerintah di kawasan tersebut, dalam kasus Indonesia adalah Kawasan Asia Pasifik, untuk berdialog mengenai hak asasi manusia. Dan pembicaraan multilateral difokuskan untuk upaya peningkatan efektifitas PBB dalam pengawasan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan pendekatan secara langsung kepada negara yang bersangkutan dengan mengingatkan pelanggaran ham yang dilakukan oleh pemerintahan yang bersangkutan. Terhadap Indonesia, beberapa kali Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat secara langsung kepada Pemerintah Indonesia melalui menteri luar negerinya maupun Presiden Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat juga membahas masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dalam pertemuan komisi hak asasi manusia PBB dan mendukung penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut. Sedangkan *pendekatan negatif* dilakukan Amerika Serikat untuk membuat pemerintahan-pemerintahan suatu negara melakukan perlindungan hak asasi manusia terhadap rakyatnya, pendekatan negatif ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pemberian sanksi perdagangan, menghalangi pemberian pinjaman oleh institusi keuangan internasional, mengurangi bantuan

ekonomi dan keamanan, mengurangi atau menanggihkan kunjungan pejabat senior dan juga dalam bentuk pelarangan penjualan senjata.

Dalam menerapkan kebijakan hak asasi manusia terhadap Indonesia, Amerika Serikat mempertimbangkan pelaksanaan hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri, untuk itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara rutin akan melaporkan perkembangan situasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.



BAB III

PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA

3.1. Sistem Pertahanan Keamanan Indonesia

Sistem Pertahanan Keamanan merupakan sebuah konsep yang dirumuskan sebagai "Tatanan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri atas komponen dasar rakyat terlatih, komponen khusus perlindungan masyarakat, dan komponen pendukung sumberdaya alam secara menyeluruh, terpadu dan terarah."¹ Selain itu pertahanan dapat juga diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk menangkal ancaman yang berasal dari luar negeri, sedangkan keamanan diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk menangkal ancaman yang berasal dari dalam negeri.

Disetiap negara tidak dapat dipungkiri bahwa komponen penting dalam sistem pertahanan keamanan adalah militer. Sebagai sebuah kekuatan bersenjata, militer berfungsi sebagai penjaga pertahanan keamanan dari segala macam bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara. Sebagai penjaga negara, militer dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya secara profesional. Militer harus bisa melindungi kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan.

¹ Dr. Indria Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis potensi dan problem*, The Habibie Center, 2001, hal 5.

*Peran dan Tugas Militer Indonesia adalah:*²

1. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :
 - Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
 - Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
 - Melaksanakan Operasi Militer selain perang.
 - Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Sistem pertahanan keamanan ini tercantum dalam Undang-undang no. 20/1982 mengenai pokok-pokok Pertahanan Keamanan, "*Upaya Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumberdaya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara.*"³ Masalah Pertahanan Keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab yang diemban oleh TNI dan Polri. Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri semakin besar, hal ini dikarenakan berbagai krisis yang terjadi di dalam negeri.

² <http://www.dephan.go.id/buku-putih/bab-ii.htm>

³ *Ibid*, hal 9.

3.1.1. TNI dan Bela Negara

TNI terbentuk pada tahun 1945, awal terbentuknya TNI pada waktu itu ditujukan untuk menjalankan fungsi pertahanan dengan titik utamanya mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945. Meskipun TNI mengalami banyak perubahan, namun tugas utama sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri tetap tidak pernah dilalaikan, seperti yang pernah diucapkan oleh Jendral Sudirman dalam amanatnya yang pertama sebagai Panglima Besar pada 25 Mei 1946, *"Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan, dengan ikhlas menjalankan segala yang menjadi kewajibannya. Tunduk kepada perintah pimpinan merupakan kekuatan suatu tentara."*⁴

Secara umum terdapat empat tugas pokok bagi Angkatan Bersenjata, yaitu :

1. Mendukung dan mengamankan berbagai kepentingan nasional.
2. Melindungi dan mempertahankan integritas wilayah nasional dari ancaman tindakan agresi pihak lawan
3. Mencegah/mengurangi dampak kerusakan wilayah sebagai akibat dari tindakan musuh.
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya.

TNI dalam menjalankan tugasnya, berpijak pada Undang-undang no.23/1959 mengenai keadaan bahaya, Peraturan Pemerintah no.16/1960 tentang

⁴ Markas Besar TNI, *ABRI abad XXI Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*, Markas Besar TNI, 1998, hal 6.

permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, serta Undang-undang no.11/1963 mengenai pemberantasan kegiatan subversi.⁵ Menurut ketentuan UU no.23/1959, sah tidaknya pernyataan keadaan darurat dapat dilihat dari tujuan dinyatakannya keadaan darurat serta terpenuhinya syarat keadaan darurat yaitu :⁶

1. Keamanan dan ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
 2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan pengambilan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun.
 3. Hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup bangsa.
- Proses itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang perlu disikapi oleh negara, oleh karenanya merupakan kepentingan negara agar dapat membangun pemerintah dan birokrasi yang senantiasa menghasilkan keputusan politik yang efektif. TNI akan senantiasa melihat keputusan kebangsaan dari segi konstitusional serta daya guna bagi bangsa dan negara. Sikap TNI sebagai alat negara dalam fungsi pertahanan, merupakan cerminan dari kepedulian TNI terhadap nasib bangsa. TNI mempunyai tugas pokok mencegah dan menindak segala bentuk ancaman terhadap keberadaan, keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa dan negara.

⁵ Dr. Indria Samego, *TNI di Era Perubahan*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 111.

⁶ <http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reported=892>

Dalam kasus Timor Timur, TNI telah menjadi perhatian dunia internasional. Sejak melakukan invasi pada tanggal 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja sampai dengan pasca jajak pendapat, TNI dinilai telah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pandangan TNI sendiri, apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah Timor Timur merupakan suatu tugas dalam rangka mempertahankan integritas wilayah Negara Republik Indonesia. Korban yang berjatuh dari pihak TNI sendiri juga tidak sedikit, mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mempertahankan wilayah Timor Timur agar tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat dilakukan persiapan jajak pendapat untuk menentukan nasib Timor Timur, TNI juga dituntut untuk dapat menjaga keamanan di wilayah itu. Perselisihan antara pihak pro-integrasi dan pro-kemerdekaan hampir menjadi perang. Oleh karena itu TNI dituntut untuk dapat bertindak tegas dalam menegakkan kewanibalsan di wilayah Timor Timur. Selain itu TNI juga harus menghadapi tekanan dari luar negeri yang terus menerus menyerukan agar TNI segera mengatasi berbagai kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Sedangkan pihak yang ditunjuk PBB untuk mempersiapkan dan melaksanakan jajak pendapat terkesan lebih berpihak pada pihak pro-kemerdekaan. UNAMET hanya bersedia melucuti senjata kelompok pro-integrasi tetapi mereka menolak melakukan hal yang sama terhadap kelompok pro-kemerdekaan.⁷ Aksi protes yang dilakukan oleh pihak pro-integrasi tidak dihiraukan, hal ini memicu kemarahan pihak pro-integrasi dan menyebabkan mereka melakukan tindakan kerusuhan. Akan tetapi

⁷ The Jakarta Post, 3 Juni 1999 (Lela E. Madjiah, *Timor-Timur, Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 60.)

pihak luar menyalahkan Indonesia, khususnya TNI dan POLRI yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan.

Setelah pengumuman jajak pendapat, pihak pro-integrasi yang mengalami kekalahan melampiaskan kekecewaannya. Kekerasan dan kerusuhan terjadi dimana-mana. TNI kembali menjadi sorotan karena keamanan wilayah di Timor-Timur masih menjadi tanggung jawab mereka. Berbagai upaya dilakukan TNI untuk memulihkan keamanan di wilayah Timor Timur, termasuk dengan menerapkan darurat militer. Akan tetapi upaya yang dilakukan TNI tetap tidak mengubah pandangan dunia internasional, TNI menjadi terdakwa yang bertanggung jawab atas kerusuhan, pembakaran, pembunuhan, serta bentuk-bentuk kekerasan lain.

Apa yang dilakukan TNI di wilayah Timor Timur merupakan keputusan politik. TNI berada di Timor Timur karena ditugaskan oleh negara. Bagi TNI, tugas yang diberikan negara merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. TNI berada di Timor Timur dalam rangka upaya menegakkan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Dalam penugasan tersebut tidak kurang dari 3.315 anggota TNI yang telah gugur, serta 2.338 mengalami cacat.⁸ Akan tetapi kenyataan bahwa Timor Timur telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan citra Bangsa Indonesia dimata internasional sebagai negara penjajah yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan dalam kasus

⁸ Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kompas, *Indonesia-Timor-Timur, Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan*, Dokumentasi CSIS, 15 Mei 2002.

tersebut, TNI menjadi tersangka utama yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.

3.1.2. Teknologi yang Dibutuhkan dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertahanan Keamanan Negara

TNI sebagai komponen utama di dalam sistem pertahanan keamanan negara mempunyai tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Untuk dapat menjalankan fungsinya, TNI memerlukan kemampuan dan ketrampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya. Pencapaian perwujudan kemampuan dan ketrampilan profesional maupun struktur kekuatan TNI memerlukan personel yang terlatih dan alat utama sistem persenjataan. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, TNI sangat memerlukan bentuk sistem persenjataan yang memadai. Bentuk sistem persenjataan ini meliputi peralatan utama dengan seluruh pendukungnya serta kemampuan dan ketrampilan prajurit TNI dalam menggunakannya.

Teknologi yang diperlukan dalam rangka pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara, antara lain:⁹

1. Elektronika, khususnya bidang mikroelektronika, dengan mengembangkan *Integrated Circuit (IC)*, terutama *Very High Speed IC*, serta berbagai aplikasinya.

⁹ Mayjen TNI Poerwadi, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisa Potensi dan Problem*, The Habibie Center, Jakarta, 2001, hal226.

2. Radar, digunakan untuk dapat memantau pergerakan lawan dan mengatasi gangguan-gangguan serta tipuan-tipuan gelombang elektromagnetik lawan.
3. Sonar, sebagai pendukung teknologi kelautan.
4. Optoelektrika, khususnya dibidang laser dan sensor-sensor infra merah.
5. *Advanced aircraft technology*, yang berguna untuk memusatkan integrasi dan fungsi-fungsi pesawat terbang untuk meningkatkan kemampuan operasi dan ketahanan.
6. Mekanika fluida untuk mendapatkan bentuk-bentuk kapal yang seefisien mungkin, baik untuk kapal permukaan air ataupun kapal selam.
7. Sistem propulsi untuk pesawat terbang, kapal, maupun kendaraan tempur darat.
8. *Directed Energy Weapons*, khususnya dibidang berkas partikel nuklir berkas laser.
9. Material baru, khususnya untuk menaikkan ketahanan pesawat terbang dan peluru kendali terhadap *directed energy weapons* atau menaikkan daya tembak kendaraan tempur darat.
10. Komputer dan teknologi perangkat lunak, termasuk teknologi intelejensia buatan dan robotik.
11. Telekomunikasi yang merupakan salah satu faktor penentu dalam sistem pertahanan teritorial maupun satelit.

Disamping kesebelas jenis teknologi tersebut, TNI juga perlu menguasai pengetahuan dibidang senjata nuklir (nuklir, biologi, dan kimia). Meskipun Indonesia tidak membenarkan penggunaan senjata nuklir, namun pengetahuan

tentang itu tetap diperlukan untuk menghadapi kemungkinan serangan nuklir lawan.

Sedangkan kebutuhan dan penguasaan Teknologi bagi TNI meliputi:¹⁰

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan kemajuan iptek yang semakin pesat dewasa ini, menyebabkan banyaknya perubahan, persaingan, dan kompleksitas sehingga kemampuan antisipasi sangat diperlukan untuk melaksanakan persiapan dan perencanaan yang baik dalam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dilakukan dengan menampilkan kemajuan dan perkembangan produk peralatan dalam bidang material dan energi, proses manufaktur, informasi dan telekomunikasi, transformasi darat, laut, dan udara, serta bioteknologi dan lingkungan. Bagi kepentingan pertahanan, perkembangan mesin, dan peralatan baru sangat diperlukan

2. Teknologi Informasi dan telekomunikasi

Dalam mengembangkan kemampuan TNI diperlukan jaringan informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran jaringan telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka pengembangan kemampuan intelejen. Kebutuhan teknologi informasi dan telekomunikasi ini akan dapat membantu perolehan informasi akan adanya campur tangan asing di wilayah Indonesia yang saat ini tengah dilanda krisis, sehingga akan dapat segera diantisipasi.

¹⁰ *Ibid*, hal 231

3. Teknologi Transportasi

Transportasi yang cepat dan tepat adalah modal utama dalam pengangkutan personel maupun peralatan. Terutama dalam kondisi menindak pengganggu keamanan disuatu wilayah tertentu. Transportasi yang juga sangat diperlukan adalah transportasi laut yang mempunyai kecepatan cukup tinggi, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Masalah transportasi laut, darat, maupun udara bukan hanya diperlukan untuk kepentingan pergerakan pasukan, namun juga sangat diperlukan untuk misi penyelamatan masyarakat yang mengungsi akibat adanya pergolakan ataupun pertikaian disuatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersedianya transportasi yang handal, sampai saat ini TNI masih banyak tergantung dari negara lain, terutama masalah suku cadang kapal laut maupun pesawat terbang.¹¹ Saat ini TNI juga sangat memerlukan pesawat terbang handal untuk keperluan pertahanan wilayah perang elektronika, dan patroli kewilayahan dalam rangka melindungi sumber daya alam.

4. Teknologi Persenjataan

Tidak dapat dipungkiri bahwa senjata merupakan instrumen penting bagi TNI dan POLRI dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. Masalah pertahanan dan keamanan seringkali berkaitan dengan masalah kekerasan, untuk itu diperlukan penggunaan kekuatan yang dapat mengatasi tindak kekerasan. Selain itu, kekuatan militer suatu negara dapat dinilai dari kondisi persenjataan yang mereka miliki.

¹¹ <http://www.beritaipstek.com/messages/aktualnews/43913200isa.html>

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia TNI

Agar kebutuhan dan penguasaan teknologi bagi TNI dapat dipenuhi, diperlukan personel-personel yang handal, mempunyai dedikasi, loyalitas, dan motivasi yang tinggi dalam memahami pentingnya peran TNI dalam sistem pertahanan keamanan negara. Personel TNI harus melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengawaki alat sistanya.

3.1.3. Dukungan Anggaran bagi Pertahanan Keamanan Indonesia

Salah satu faktor penunjang terwujudnya kemampuan pertahanan keamanan yang ideal adalah daya dukung anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selama ini kemampuan Negara mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun dibawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai bahan perbandingan, negara-negara dikawasan Asia Tenggara pada umumnya mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 4%-5% dari PDB¹². Dengan anggaran kurang dari 1% PDB sangat sulit untuk membangun kekuatan pertahanan yang memadai. Sedangkan profesionalisme TNI sudah merupakan tuntutan jaman. Profesionalisme TNI hanya dapat terwujud apabila prajurit TNI dilatih dengan baik dan memiliki perlengkapan yang memadai. Akan tetapi anggaran pertahanan yang ditetapkan oleh Pemerintah belum memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berikut ini terdapat perbandingan kondisi Militer Indonesia dibandingkan dengan negara lain:

¹² <http://www.dephan.go.id/buku-putih/ringkasan.htm>

¹³ <http://www.angkasa-online.com/13/12/fokus/fokus2.htm>

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Tentara Indonesia dan Negara Lain

Negara	Jumlah prajurit/Pendd (%)	Jumlah Prajurit/Luas Wilayah (%)	Produk Domestik Bruto (%)	Anggaran Pertahanan/ APBN (%)
Australia	1,43	0,03	2,3	7,13
Brunei	-	0,75	6,9	17,96
Filipina	0,16	0,35	2,2	19,88
Malaysia	0,68	0,35	4,0	9,08
Thailand	0,46	0,50	2,8	15,04
Singapura	2,06	100	5,2	20,97
Indonesia	0,24	0,23	1,8	7,70

Sumber: Departemen Pertahanan, Kompas 5 juli 2000

Untuk pengadaan pesawat, jumlah yang ideal setidaknya diperlukan delapan skuadron tempur dengan 124 pesawat tempur, satu skuadronintai dan peringatan dini, 33 satuan radar, 12 satuan rudal jarak pendek, 16 satuan rudal jarak menengah, 8 satuan rudal jarak jauh, 12 lanud induk, dan 38 lanud operasi¹³. Untuk TNI AL hanya memiliki 34 kapal patroli dan perang, sedangkan jumlah standart untuk menjaga perairan Indonesia yang luas, memerlukan 90 kapal dan untuk jumlah idealnya adalah 120 kapal.¹⁴

3.2. Peran Amerika Serikat Terhadap Sistem Pertahanan Keamanan

Indonesia

Saat ini, Amerika Serikat memiliki kekuatan disemua kategori sebagai suatu negara besar, sehingga Amerika Serikat mempunyai keunggulan peran dalam politik internasional. Sebagai satu-satunya negara adikuasa setelah perang dingin, Amerika serikat memerankan peranan yang sangat penting dalam

¹⁴ http://www.tempo.co.id/news/2003/9/2/1.1.48_id.html

ketertiban dunia. Dalam menghadapi suatu konflik, harus diakui meningkat atau tidaknya suatu konflik tergantung dari apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam menangani konflik tersebut. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat. Semula Indonesia bersikeras menangani masalah keamanan di wilayah tersebut tanpa bantuan Internasional, karena Pemerintah Indonesia menganggap keamanan di wilayah itu masih menjadi tanggung jawab Indonesia. Akan tetapi dengan campur tangan Amerika Serikat, akhirnya Indonesia menerima pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam *International Force for East Timor (INTERFET)* untuk menangani masalah keamanan di wilayah Timor Timur.

3.2.1. Keunggulan Ekonomi-Militer Amerika Serikat

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai pendapatan perkapita terbesar di dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga menguasai badan-badan dunia yang bergerak dibidang ekonomi, dengan kondisi semacam itu dapat dikatakan Amerika Serikat bisa mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Kekuatan ekonomi yang dimiliki Amerika Serikat dapat dilihat dari tabel perbandingan kekuatan negara-negara besar dalam bidang ekonomi berikut ini;¹⁵

¹⁵ *Op.cit*, hal 151.

Tabel 2. Perbandingan Kekuatan Negara-negara Besar Dalam Bidang Ekonomi
(Data pada Tahun 1998)

Negara-Negara Besar	Gross Domestik Bruto (GNP)	Pendapatan Perkapita
Amerika serikat	\$ 6.374 M	\$ 24.800
Rusia	\$ 1.160 M	\$ 7.800
Inggris	\$ 1.100,4 M	\$ 17.300
Perancis	\$ 1.348 M	\$ 19.500
Cina	\$ 507,5 M	\$ 2.200
Jerman	\$ 1.807 M	\$ 20.800
Italia	\$ 1.246 M	\$ 17.700
Kanada	\$ 598,5 M	\$ 20.500
Jepang	\$ 3.761,5 M	\$ 20.700

Sumber: The Military Balance 1999-2000

M=Milyar

Keunggulan peran yang dimiliki oleh Amerika Serikat juga tidak terlepas dari kondisi militernya. Dalam bidang militer, jumlah anggaran pertahanan Amerika Serikat hanya bisa disaingi oleh Cina dan Rusia. Begitu juga dengan jumlah pasukan dan kekuatan senjata nuklir, Amerika Serikat tetap memiliki senjata nuklir yang siap diluncurkan dalam jumlah terbesar di dunia, serta jumlah pasukan yang berada dipangkalan militer Amerika serikat yang berada diberbagai negara.

Berikut ini perbandingan kekuatan negara-negara besar dalam bidang militer.¹⁶

¹⁶ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc, *Studi Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 150.

Tabel 3. Perbandingan Kekuatan Negara-negara Besar Dunia Dalam Bidang Militer (Data Pada Tahun 1998)

Negara-negara Besar	Anggaran Pertahanan	Jumlah Pasukan	Kekuatan Nuklir	
			Persediaan	Siap Digunakan
Amerika serikat	\$ 276,1 M	1.650.000	12.000	6.750
Rusia	\$ 76,6 M	1.714.000	21.000	5.426
Inggris	\$ 34,2 M	254.300	200	200
Perancis	\$ 37,2 M	406.600	500	444
Cina	\$ 7,4 M	2.930.000	500	325
Jerman	\$ 31,8 M	241.600	—	—
Italia	\$ 16,5 M	322.300	—	—
Kanada	\$ 9,6 M	78.100	—	—
Jepang	\$ 39,7 M	237.700	—	—

Sumber: The Military Balance 1999-2000 dan www.fas.org

M=Milyar

Amerika Serikat juga merupakan eksportir perlengkapan militer terbesar didunia. Ada dua cara penjualan perlengkapan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat¹⁷; *pertama* lewat program FMS (Foreign Military Sales), program ini merupakan program penjualan senjata dari pemerintah ke pemerintah. Dalam penjualan lewat program FMS ini, ada peralatan militer yang berharga subsidi dengan pembiayaan khusus. *Kedua*, lewat sistem pemberian ijin penjualan persenjataan secara komersil oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan swasta. Kesepakatan penjualan perlengkapan militer Amerika Serikat pada tahun 2001 saja sudah mencapai lebih dari 12 miliar dollar AS, dan total nilai senjata yang diberikan pada negara lain mencapai 10 miliar dollar AS.

¹⁷ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/27/ekoint/324445.htm>

Dengan menjual atau memberikan perlengkapan militer pada sebuah negara yang tidak dapat memproduksi perlengkapan militer sendiri, Amerika Serikat dapat memperoleh kontrol tertentu atas negara tersebut. Hal ini dikarenakan ketergantungan suatu negara pada pemasok perlengkapan militer dari luar negeri lebih dari sekedar ketergantungan terhadap pengadaan perlengkapan itu. Hal ini menyangkut pengadaan suku cadang, jasa pemeliharaan, serta pelatihan dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Jadi negara yang memasok perlengkapan militer dapat berpengaruh terhadap negara yang menerima. Dengan demikian, Amerika Serikat semakin memantapkan diri sebagai satu-satunya negara adikuasa setelah berakhirnya masa perang dingin.

3.2.2. Peran Amerika Serikat Bagi Militer Indonesia

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa mempunyai peran yang cukup besar terhadap Indonesia. Selama ini Amerika Serikat telah memainkan peranan penting dalam membantu Indonesia secara finansial. Bantuan tersebut antara lain:¹⁸

1. Sejak terjadinya krisis ekonomi, Amerika Serikat telah menggunakan suara dan hak pilihnya di Lembaga-lembaga Keuangan Internasional seperti, IMF dan World Bank, untuk mendukung agenda reformasi ekonomi Indonesia.
2. Amerika Serikat bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan negara-negara donor lainnya melalui *Consultative Group on Indonesia*, yang menjanjikan bantuan sebesar \$ 270 juta.

¹⁸ Pidato Duta Besar Robert S. Gelbard 14 November 2000, *Hubungan Ekonomi Amerika Serikat-Indonesia*, <http://www.usembassy.state.gov/jakarta.html>

3. Sebagian besar bantuan Amerika Serikat adalah hibah kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendorong kemajuan reformasi ekonomi Indonesia.
4. Selama 3 tahun terakhir, Amerika Serikat telah menyediakan bantuan makanan senilai lebih dari \$ 350 juta.
5. Amerika Serikat menyediakan program bantuan kemanusiaan untuk daerah-daerah di Indonesia yang sedang mengalami krisis, seperti Timor Barat, Papua, Aceh dan Maluku.
6. Lembaga Perdagangan Amerika Serikat seperti, US Exim Bank, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan Trade Development Agency (TDA) telah mengembangkan inisiatif perdagangan dan keuangan bersama untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Indonesia dan menyediakan dana sebesar \$ 400 juta untuk memajukan perdagangan dan investasi di Indonesia.
7. Departemen Perdagangan Amerika Serikat akan memberikan dana sebesar \$100 juta di bawah Generalized System of Preference (GSP), yang memungkinkan produk-produk Indonesia masuk pasar Amerika Serikat tanpa pajak. Dengan program GSP diharapkan akan meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat

Indonesia juga telah lama menjalain hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, dalam bentuk penjualan senjata dan bantuan militer lainnya. Amerika Serikat juga memiliki perwakilan militer yang ditempatkan di Indonesia.

Militer Amerika Serikat di Indonesia diwakili oleh organisasi-organisasi sebagai berikut:¹⁹

1. Kantor Atase Pertahanan (*Defense Attache Office*)

Kantor Atase Pertahanan dipimpin oleh Atase Pertahanan. Semua korps Angkatan Darat, Laut, Udara dan Marinir AS mempunyai perwakilan yang ditugaskan di Kantor Atase Pertahanan (DAO). Personel DAO memelihara kontak antar militer dengan rekan-rekan mereka di Indonesia. Personel DAO juga membantu Indonesia dalam memodernisasi pasukan bersenjata dengan cara mendapatkan peralatan militer dari Amerika Serikat dan dengan menyelenggarakan program-program pertukaran militer yang memungkinkan personel militer Indonesia belajar sementara di sekolah militer Amerika Serikat.

2. Kantor Atase Militer Amerika Serikat untuk Program-Program Pertahanan (*The US Office of The Military Attache for Defense Program/OMADP*)

Perwakilan ini memberikan masukan dan bantuan kepada Atase Pertahanan dan Kepala Misi Diplomatik Amerika Serikat mengenai masalah bantuan keamanan. OMADP bekerja dengan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program dan rencana-rencana bantuan keamanan guna mendukung kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia, memberikan petunjuk, dukungan dan bantuan kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika Serikat, memasarkan sistem pertahanan; artikel-artikel dan pelatihan, dan mengembangkan kerjasama pertahanan dalam persenjataan di Indonesia sesuai dengan pengarahan

¹⁹ <http://www.usembassy.state.gov/jakarta/wwwhamem.html>

Departemen Pertahanan, Komando Pasifik dan Departemen Militer Amerika Serikat. OMADP dipimpin oleh seorang Kolonel yang jabatannya adalah Atase Militer untuk program-program Pertahanan.

3. Unit 2 Penelitian Medis Angkatan Laut (*The Naval Medical Research Unit#2/NAMRU-2*)

Unit ini mulai beroperasi di Indonesia tahun 1970. Badan yang didirikan untuk mempelajari penyakit-penyakit tropis ini berkantor di Departemen Kesehatan. NAMRU-2 adalah bagian dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Staf NAMRU-2 bekerjasama dengan Departemen Kesehatan Indonesia di bidang pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kelembagaan, dan penelitian serta pengawasan penyakit-penyakit menular. Misi NAMRU-2 adalah untuk mengadakan penelitian, percobaan-percobaan dan evaluasi penyakit menular untuk memajukan kesehatan, keamanan dan kesiapan Pasukan Bersenjata Amerika Serikat agar dapat bekerja secara efektif di masa damai dan dapat menjalankan misi-misi darurat di seluruh Asia Tenggara. Namun hubungan bilateral tersebut mengalami gangguan sejak insiden Timor Timur, dimana militer Indonesia menjadi tersangka pelanggaran berat hak asasi manusia.

Sebelum adanya krisis Timor Timur, Amerika Serikat merupakan pensuplay persenjataan terbesar untuk Indonesia. Jenis perlengkapan militer yang didatangkan dari Amerika Serikat ada berbagai macam. Dan untuk pengadaan perlengkapan militer tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana yang cukup besar.

Tabel 4. Jenis Perlengkapan Militer yang Diimport dari Amerika Serikat²⁰

Jenis Barang	Nilai (\$)
Penggunaan asisten Teknologi	2,435,000
Suku Cadang Pesawat Tempur A-4	3,495,000
Suku Cadang Pesawat Angkut C-130	278,333
Suku Cadang Pesawat Tempur F-4	759,170
Suku Cadang Pesawat Tempur F-5	2,224,005
Bermacam-macam Suku Cadang Pesawat	7,283,137
Suku Cadang Pesawat AV10A	177,622
Suku Cadang Pesawat Latih T-38	-
Perlengkapan Produksi Amunisi	4,977
Bahan Mentah Amunisi	6,105,114
Antena (Radio dan Komunikasi)	1,000
Lantakan Baja	7,600
Suku Cadang Kendaraan Untuk Pusat Pelatihan	83,334
Perlengkapan Artileri	128,305
Baterai (Semua Jenis)	14,850
Perlengkapan Pendeteksi Bahan Kimia	27,115
Bahan-bahan Kimia	78,050
Komponen Perlengkapan Komunikasi	4,719
Komponen dan Perlengkapan Penunjuk Arah	165,500
Komponen-komponen Elektronik	1,201,057
Suku Cadang Mesin Jet T-56	2,000,000
Komponen Sistem Kontrol Senjata	1,075,782
Suku Cadang Helicopter	31,336
Helm Pilot (Semua Model)	3,176
Helm Pengaman (Semua Model)	35,108
Sistem Navigasi Inertial (Semua Model)	1,062,400
Magnetron	7,010
Suku Cadang dan Perlengkapan Rudal Harpoon	250,000
Suku Cadang dan Perlengkapan Pelontar Rudal	76,594
Parasut (Personel)	70,000
Komponen dan Perlengkapan Pengaman	2,820
Komponen Suku Cadang Sistem Radar	2,944,334
Penerima Transmitter (Semua Model)	84,796
Komponen Suku Cadang Kapal	720
Komponen Suku Cadang Sonar	459,000
Data-data Teknis	5,525
Transmitter	27,562
Tansponder	89,396
Tabung Gelombang Portabel	14,200
Total	32,724,155

²⁰ <http://www.fas.org/asmp/profiles/655/dcs/dcs.Indonesia.98.pdf>

Sejak tahun 1975, Pemerintah Amerika Serikat secara rutin telah memasok perlengkapan militer untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya perang dingin pada masa itu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat berorientasi penuh untuk menghambat penyebaran paham komunis di seluruh dunia. Untuk itu Pemerintah Amerika Serikat mendukung keputusan yang diambil Pemerintah Indonesia untuk menganeksasi Timor Timur yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok yang beraliran komunis, meski dukungan itu tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Berikut ini terdapat data yang menunjukkan transaksi perlengkapan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia sebelum pemberlakuan embargo militer.²¹

²¹ <http://www.fas.org/asmp/profiles/census.html>

Tabel 5. US Arm Transfer To Indonesia, 1975-1995 (In millions of Current Dollars)

Years	FMS	Commercial	MAP/Axcess	Total
1975	\$ 51,6	\$ 0,3	\$ 13,1	\$ 65,0
1976	\$ 3,7	\$ 6,7	\$ 26,9	\$ 37,3
1977	\$ 7,6	\$ 5,3	\$ 14,1	\$ 27,0
1978	\$109,6	\$ 3,0	\$ 14,4	\$127,0
1979	\$ 37,9	\$17,0	\$ 1,9	\$ 56,8
1980	\$ 14,6	\$ 6,2	\$ 5,4	\$ 26,2
1981	\$ 45,1	\$ 6,6	\$ 9,0	\$ 52,6
1982	\$ 52,8	\$ 1,0	\$ 1,9	\$ 54,8
1983	\$ 32,2	\$ 7,8	-	\$ 40,0
1984	\$ 9,6	\$16,6	-	\$ 26,2
1985	\$ 19,7	\$29,3	-	\$ 49,0
1986	\$295,5	\$16,0	-	\$311,5
1987	\$ 3,5	\$21,5	-	\$ 25,0
1988	\$ 5,1	\$ 6,9	-	\$ 12,0
1989	\$ 1,9	\$32,1	-	\$ 34,0
1990	\$ 18,9	\$33,1	-	\$ 52,0
1991	\$ 27,8	\$ 6,7	-	\$ 34,5
1992	\$ 10,7	\$18,1	-	\$ 28,8
1993	\$ 30,8	\$ 4,0	-	\$ 34,8
1994	\$ 11,1	\$ 8,0	-	\$ 11,9
1995	\$ 11,3	\$ 1,2	-	\$ 12,5
Total	\$801,0	\$239,3	\$ 78,6	\$1,118,9 M

Sources: Pentagon's Foreign Military Sales (FMS) program, The Commercial arms sales Program, dan Military Assistance Program serta Excess Defence Articles (MAP/Excess) are drawn from U.S. Departement of Defence

3.3. Penerapan Embargo Militer Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Dampak yang Ditimbulkan

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, semua peralatan militer Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Sebagian besar peralatan militer beserta suku cadangnya dipasok oleh Amerika Serikat, hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan yang sangat besar ketika Amerika Serikat memberlakukan embargo militer karena adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia di Timor Timur. Embargo yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia antara lain:²²

- Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)
- Amunisi
- Jasa Pemeliharaan, pendidikan latihan
- IMET (*International Military Education and Training*)
- Suku cadang bagi pesawat tempur (A-4 skyhawk, F-5, F-16 model A dan B)
- Peralatan perang (Senjata torpedo jenis Harpoon)
- Pesawat angkut (Hercules C-130)

Setelah pemberlakuan embargo militer tersebut, transaksi penjualan senjata Amerika Serikat kepada Indonesia merosot tajam, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:²³

²² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/15/In/131601.htm>

²³ <http://www.fas.org/asmp/profiles/sales.dba.php?region=capc&ctryn=idn&fylin=1996-2001>

Tabel 6. U.S. Arms Licenses and Agreement With Indonesia for 1996-2001
(Foreign Military Sales Program)

Fiscal Years	Equipment	Construction	Total
1996	\$28,098,000	\$28,098,000	\$56,196,000
1997	\$724,000	\$0	\$724,000
1998	\$283,000	\$0	\$283,000
1999	\$1,063,000	\$1,063,000	\$1,063,000
2000	\$0	\$0	\$0
2001	\$0	\$0	\$0

Embargo militer yang diterapkan Amerika Serikat kepada Indonesia menimbulkan dampak yang cukup besar bagi militernya, hal ini disebabkan selama ini peralatan militer yang dimiliki Indonesia sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Dengan berkurangnya peralatan militer, upaya-upaya penyelesaian suatu konflik atau masalah keamanan di wilayah Indonesia menjadi terhambat.

Secara garis besar dampak embargo Amerika Serikat adalah :²⁴

1. Tidak tersedianya sejumlah peralatan dan suku cadang pesawat, sehingga menghambat misi kemanusiaan dan keselamatan di daerah rawan konflik.
2. Embargo Senjata Amerika Serikat semakin menambah beban pemerintah sehingga penyelesaian konflik semakin berlarut-larut dikarenakan kekurangan peralatan yang dibutuhkan.

²⁴ Menhan Matori Abdul Jalil dalam Media Indonesia, *Indonesia-Amerika bahas masalah Keamanan*, Dokumentasi CSIS, 25 April 2002.

3. TNI terpaksa menarik beberapa pesawat kargo dan kapal patroli yang diperlukan karena kerusakan teknis, akibat tidak tersedianya suku cadang.

3.3.1. Dampak Embargo Amerika Serikat bagi TNI Angkatan Darat dan Polri

TNI Angkatan Darat adalah salah satu Angkatan Bersenjata yang dimiliki Indonesia yang bertugas sebagai alat pertahanan negara di wilayah darat. Sedangkan Polri bertugas untuk menjaga keamanan negara. Bagi TNI Angkatan Darat dan Polri, embargo militer Amerika Serikat tidak terlalu mempengaruhi persenjataan strategisnya, karena TNI Angkatan Darat dan juga Polri menggunakan persenjataan strategis beserta suku cadang buatan dalam negeri. Peralatan militer yang dimiliki TNI Angkatan Darat dan Polri seperti senapan, rudal dan angkutan darat masih dapat disediakan oleh produsen dalam negeri seperti PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, dan beberapa produsen lainnya. Begitu juga perawatan persenjataan masih dapat dilakukan di dalam negeri.²⁴ Bahkan selama ini PT Pindad secara rutin memasok peralatan standart untuk TNI dan Polri semacam amunisi dan senjata SS1.

3.3.2. Dampak Embargo Militer bagi TNI Angkatan Laut

Kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari :²⁵

1. Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT)

1. Kekuatan TNI Angkatan Laut ditentukan oleh kapal yang diukur dengan persenjataan, jenis serta jumlah dan kuantitas personel yang mengawakinya. Kekuatan TNI AL tersebut diarahkan sebagai kekuatan

²⁴ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2002/4/23/n3.htm>

²⁵ <http://home.indo.net.id/duta/kekuatan.html> .

strategis yang dikembangkan atas dasar Sistem Persenjataan Armada Terpadu dengan komponen-komponen : kapal, pesawat udara, marinir dan pangkalan.

2. SSAT merupakan perpaduan antara kekuatan tempur strategis dengan pendukung logistik strategisnya, mencerminkan wujud TNI AL yang bulat dan utuh.

2. Struktur kekuatan TNI Angkatan Laut

Kekuatan TNI Angkatan Laut yang diwujudkan sebagai SSAT dapat distrukturkan sebagai berikut :

1. Kapal sebagai senjata dasar
 1. Satuan Kapal Eskorta
 2. Satuan kapal Selam
 3. Satuan Kapal Ampibi
 4. Satuan Kapal Cepat
 5. Satuan Kapal Ranjau
 6. Satuan Kapal Patroli
 7. Satuan Kapal Bantu
 8. Satuan Kapal Hidrooseanografi
 9. Satuan Kapal Angkutan Lintas Laut Militer
2. Pesawat Udara
 1. Pesawat Udara AKS
 2. Pesawat Udara Intai Taktis
 3. Pesawat Udara Angkut

3. Marinir

1. Pasukan Infantri

2. Pasukan Bantuan Tempur

3. Pasukan Bantuan Administrasi

4. Pangkalan

Pangkalan TNI Angkatan Laut merupakan jaringan logistik bagi satuan operasional TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan: fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personel, pembangunan pangkalan.

Peralatan TNI Angkatan Laut sarat dengan teknologi tinggi, hal ini disebabkan tugas yang harus diemban oleh TNI AL meliputi perairan di seluruh wilayah Indonesia. Selain kapal laut, TNI AL juga memiliki beberapa pesawat udara. Pesawat udara yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut kebanyakan keluaran dari Amerika Serikat, seperti F-16, F-5, dan A-4 skyhawk, sedangkan suku cadang kapal-kapal perang juga berasal dari Amerika Serikat. Akibat embargo yang dikenakan Amerika Serikat, kesiapan pesawat udara yang dimiliki TNI Angkatan Laut mengalami penurunan, sedangkan untuk kapal perang, dari 114 kapal perang yang ada, hanya 30 kapal perang yang dapat beroperasi dengan baik. Akibat embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, TNI Angkatan Laut tidak dapat menggunakan peralatan-peralatannya untuk perang, mereka hanya bisa menggunakannya untuk memburu perompak di wilayah Perairan Republik Indonesia.²⁶ Berbeda dengan pesawat udara yang

²⁶ Laksamana Bernard Kent Sondakh dalam <http://www.indonesia-house.org/focus/militer/o6300>

masih bisa menggunakan sistim kanibalisasi, kapal perang TNI Angkatan Laut harus benar-benar mendapatkan suku cadang yang baru agar dapat beroperasi dengan optimal.

3.3.3. Dampak Embargo Militer bagi TNI Angkatan Udara

TNI Angkatan Udara merupakan komponen Angkatan Perang yang berbobot teknologi tinggi. Peralatan militer yang dimiliki Angkatan Udara selain persenjataan dan peralatan tempur, yang paling penting adalah pesawat udara. Permasalahan pesawat udara beserta suku cadangnya merupakan permasalahan yang sangat vital bagi TNI Angkatan Udara. Hal ini menentukan hidup matinya kesiapan operasional armada udara. Sejak diberlakukannya embargo militer oleh Amerika Serikat, TNI Angkatan Udara mengalami kesulitan besar dalam mengoperasikan pesawat udaranya. Pesawat TNI AU yang dapat dioperasikan menurun sampai 50 persen. Hanya sekitar 113 dari 226 pesawat tempur yang mampu beroperasi maksimal.²⁷

Jenis pesawat yang dimiliki TNI AU yang terkena dampak embargo militer antara lain, pesawat tempur F-16 tipe A dan B, F-5, F-34C berasal dari Amerika Serikat, Puma SA-330 berasal dari Perancis, dan pesawat BAe dan Hawk MK-53 berasal dari Inggris. Sementara itu pesawat yang berada dalam pemeliharaan yaitu, F-5E Tiger juga ditahan oleh Amerika Serikat. Selama ini prosedur pengadaan pesawat dari Amerika Serikat harus melalui Foreign Military Sale (FMS) yang memerlukan waktu yang panjang dan rumit. Amerika Serikat dalam menjual pesawat militer belum memberikan keleluasaan kepada negara

²⁷ Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Imam Wahyudi, dalam Tempo, *Embargo AS tak Pengaruhi Angkatan Darat*, Dokumentasi CSIS, 6 Maret 2002.

pembeli untuk membuat atau memproduksi pesawat sejenis dengan dasar lisensi. Dengan pemberlakuan embargo militer, Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh suku cadang dan jasa pemeliharaan pesawat-pesawat tersebut.²⁸ Sementara untuk suku cadang pesawat Angkut Hercules C-130, pesawat non combat Fokker F-27/F-28, C-212/C235, dan berbagai tipe helikopter, pasaran suku cadang di dunia penerbangan masih memungkinkan untuk disediakan.²⁹

Pada tahun-tahun awal, kesulitan operasional dapat diatasi TNI AU dengan cara pinjam-pakai (kanibal) antara pesawat yang disiapkan untuk penerbangan dengan pesawat dalam pemeliharaan, namun cara ini tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Disamping akan mengurangi jumlah kesiapan pesawat yang operasional, setiap suku cadang juga mempunyai usia pakai, baik dihitung dalam jam pemakaian maupun yang akan mengalami batas waktu pemakaian.³⁰ Untuk pesawat angkut Hercules C-130, dari 27 pesawat yang dimiliki TNI AU, hanya tersisa 11 pesawat dalam kondisi siap. Sedangkan untuk pesawat F-16, dari 10 pesawat yang dimiliki TNI AU, hanya 3 yang masih layak terbang.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat adanya embargo militer Amerika Serikat, kesiapan TNI Angkatan Udara mengalami penurunan.

²⁸ <http://www.korwilpdip.org/17RUSIA.htm>

²⁹ <http://www.angkasa-online.com/11/01/utama/utama3.htm>

³⁰ *Ibid*

³¹ http://www.indonesia-house.org/focus/militer/Ekspor_senjata_ero.htm

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Seperti diketahui, hubungan Indonesia-Amerika Serikat mengalami gangguan sejak adanya pemberlakuan embargo militer oleh Amerika Serikat karena militer Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur. Sejak diterapkannya embargo militer pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat agar mencabut embargo militernya. Pemerintah mengambil keputusan untuk memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat, karena posisi Indonesia relatif tergantung kepada Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai pengaruh sangat besar didunia internasional.

Amerika Serikat banyak memainkan peran yang sangat penting didunia internasional. Indonesia yang sampai saat ini masih berlutut dengan krisis ekonomi, sangat membutuhkan dukungan lembaga-lembaga keuangan dunia yang banyak dikuasai oleh Amerika Serikat. Jika hubungan militer tidak segera dipulihkan, dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya hubungan diplomatik kedua negara sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dari yang telah dialami oleh Indonesia.

Karena adanya embargo militer yang diterapkan Amerika Serikat, kemampuan militer Indonesia dapat dikatakan menurun. Hal ini disebabkan berkurangnya peralatan militer yang dimiliki oleh militer Indonesia. Untuk dapat

memulihkan hubungan militer itu, Amerika Serikat memberikan syarat-syarat kepada Indonesia yang tercantum dalam Amandemen Leahy. Dalam Amandemen tersebut disebutkan jika Indonesia menginginkan kembali bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur dan pemulihan hubungan militer tersebut tergantung dari reformasi yang dilakukan ditubuh TNI.

Bagi Indonesia tidak ada cara lain selain memenuhi tuntutan Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan Amerika Serikat agar segera mencabut embargo militernya. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai dialog dan perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk membahas masalah tersebut. Sehingga Pemerintah Amerika Serikat setuju untuk melonggarkan embargo militernya. Namun hal ini ternyata tidak membawa pengaruh besar bagi Indonesia, karena Indonesia masih tetap mendapatkan kesulitan dalam memperoleh peralatan militernya.

Upaya untuk terus membuat Pemerintah Amerika Serikat agar memulihkan hubungannya dengan Indonesia tetap dilakukan. Dengan demikian diharapkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan dengan baik. Namun dengan tidak mengecilkan peran Amerika Serikat, Pemerintah berusaha mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan militernya. Dengan sangat hati-hati, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan peralatan militer bagi TNI dan Polri. Hal ini dilakukan untuk melepaskan ketergantungan dalam pengadaan

perlengkapan militer hanya kepada satu negara dan memperkuat kesiapan militer Indonesia sebagai alat Pertahanan dan Keamanan Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru Bandung, 1992.
- Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Telaah Teoritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar dan Metode Tehnik*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Andre H. Pareira, *Negara Dalam Studi Hubungan Internasional: Perubahan dan Kestinambungan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Robert Holden, et.all, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Dr. Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional, kerangka studi Analitis*, Binacipta, 1987.
- Juwono Sudarsono, et.all, *Studi Hubungan Internasional dan tantangan masa depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.
- Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Hasan Qathamsi, *Amerika Diktator Dunia*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001.
- Dr. Indria Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, The Habibie Center, 2001.
- _____, *TNI di Era Perubahan*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Rizal Sukma, *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi Di Indonesia, persepsi sipil dan militer*, CSIS, Jakarta, 1999.

Dr. Bambang Cipto, M.A, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.

Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc, *Studi Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.

Lela E. Madjiah, *Timor Timur, Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Laporan:

Markas Besar ABRI, ABRI abad XXI, Redefinisi, Reposisi, dan reaktualisasi Peran Abri dalam Kehidupan Bangsa, 1998

Laporan Tahunan Komnas HAM Indonesia tahun 1999.

Koran Dan Majalah:

Suara Karya, Reaksi internasional Atas situasi Timtim, 7 September 1999.

_____, PBB dan AS Dukung Prakarsa RI, 17 Februari 2000.

Kompas, Penerapan Darurat Militer, Landasan Hukum bagi Militer untuk Lebih Keras dan Tegas, 8 September 1999.

_____, Washington Tangguhkan Kerjasama Militer, 11 September 1999.

_____, Indonesia Undang Pasukan PBB, 13 September 1999.

Media Indonesia, Pemulihan Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat, september 1999.

_____, Reaksi Internasional atas Timtim, Dewan Keamanan PBB hanya Mendesak, 9 September 1999.

_____, Rumsfeld Desak Kongres AS Cabut Embargo atas RI, 15 Mei 2002.

Tempo, AS Ajukan Syarat Bantuan Militer, 12 April 2001.

_____, AS Beri Syarat Pemulihan Hubungan Militer, 1 September 2001.

_____, Embargo AS tak Pengaruhi Angkatan Darat, 6 Maret 2002.

Internet:

<http://www.dfa-deplu.go.id/policy/view/humanrights/ringkppham.htm>



- <http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=892>
- <http://www.kompas.com>
- <http://www.kompas.com/kompas>
- <http://www.heritaiptek.com/messages/aktualnews/43913200isa.html>
- <http://www.usembassy.state.gov/jakarta/www/whamem.html>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0702/23/0104>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/15/ln/131601.htm>
- <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2002/4/23/n3.htm>
- <http://www.home.indo.net.id/duta/kekuatan.html>
- <http://www.indonesia-house.org/focus/militer/063003Ekspr-senjata.ero.htm>
- <http://www.korwilpdip.org/17RUSIA.htm>
- <http://www.angkasa-online.com/11/01/utama/utama3.htm>
- <http://www.indonesia-hose.org/focus/militer/Ekspor.senjata.ero.htm>
- <http://www.detik.com/gudangdata/kpp-ham-timtim4.shtml>
- <http://www.mabesad.mil.id/palagon/edisi12/sby.htm>
- <http://www.intl-crisis-group/proiect/showreport.cfm?reportid/2001>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0802/05/teropong>
- <http://www.tempo.co.id/news/2002/6/18/1%2C1%2C36%2Cid.html>
- <http://wwwindonesia-house-org/focus/militer/040503Rusia-polandia.arm.htm>